

# **PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN**

**(Studi tentang Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan  
Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana  
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

**MUH. ZULKIFLI A TOMY  
NIM. 0510313089**



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI  
JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK  
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN  
MALANG  
2009**

## RINGKASAN

Muh. Zulkifli A Tomy, 2009. **Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi tentang Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)**. Skripsi. Konsentrasi Administrasi Pembangunan. Jurusan Administrasi Publik. Universitas Brawijaya Malang. **Dosen Pembimbing: (1) Mochamad Makmur Drs, Ms, (2) Riyanto Drs, M. Hum**, 98 Halaman + xiii

---

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang lagi kearah yang lebih maju. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa Indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa – bangsa lain yang lebih maju. Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek pembangunan. Permasalahannya terkadang perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan lancar, atau bisa berjalan tetapi tidak mencapai target-target yang telah ditentukan dalam perencanaan. Maka dalam proses perencanaan pembangunan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program - program pembangunan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada pengembangan kawasan Tapak Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo, dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor pendukung dan faktor Penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan kawasan Tapak Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara, dan melakukan observasi serta mencari dokumen-dokumen yang terkait. Fokus dari penelitian ini antara lain: 1) Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga ngebel di Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari a) Penyusunan rencana b) Penyusunan program rencana c) Pelaksanaan Rencana d) Pengawasan atas pelaksanaan rencana e) Evaluasi 2) Faktor pendukung dan faktor Penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

Dari hasil penelitian ini dapat diperoleh bahwa: 1) Proses perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dimana dilaksanakan tahapan-tahapan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat yang meliputi Penyusunan rencana, Penyusunan program rencana, Pelaksanaan Rencana, Pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan Evaluasi. Karena masyarakat adalah salah satu faktor pendukung dari suatu pembangunan. 2) Dalam proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini tidak mengalami kendala atau hambatan. Meskipun kondisi sosiokultur dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan masih

rendah, tetapi pemerintah berhasil mensosialisasikan proyek perencanaan pengembangan ini dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat sekitar dan dapat berperan serta dalam proses perencanaan pembangunan. Yang menjadi kendala dalam pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini adalah faktor dana, karena ini adalah proyek besar jadi harus ada dana yang besar pula. 3) Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk: a) Memanfaatkan produk tata ruang sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik. b) Memberikan bantuan atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan yang dimaksud. c) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang-ruang yang ada, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pembangunan. d) Memberikan bantuan berupa pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang. e) Menyebarluaskan hasil rencana yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo. f) Melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung upaya mewujudkan rencana penataan kawasan seperti yang termuat dalam Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel. g) Memanfaatkan produk rencana ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan investasi. h) Melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk pembangunan fisik yang dilakukan di kawasan wisata Telaga Ngebel. i) Memenuhi ketentuan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

Terkait dengan hal di itu, saran yang diberikan yaitu dalam kegiatannya hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, meskipun proses sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat, tetapi hal ini perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengembangan kawasan Telaga Ngebel ini maka proses perencanaan dan pelaksanaan akan berjalan dengan lancar. Selain itu, aksesibilitas juga memegang peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah. Yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan wilayah adalah memperbaiki aksesibilitas jalan menuju kawasan tersebut. Kelancaran transportasi adalah salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan sebab kelancaran kedatangan wisatawan menuju kawasan wisata Tergantung pada hal ini. Pemerintah juga harus memperbanyak even-even tahunan yang diselenggarakan secara periodik. Hal ini dimaksudkan untuk menambah daya tarik obyek wisata yang ditawarkan oleh kawasan wisata Telaga Ngebel.

## SUMMARY

Muh. Zulkifli A Tomy, 2009. **Community Participation in the Development Planning (Study on Development Planning of Telaga Ngebel Tourist Resort Site, Ngebel Subdistrict, Ponorogo Regency)**. Thesis. The Concentration on Development Administration. Public Administration Department. Malang Brawijaya University. **Supervisor: Mochamad Makmur, Drs, Ms, Co-supervisor: Riyanto, Drs, M. Hum.** 98 pages + xiii

---

The development represents a form of a nation's willingness and ability to develop toward the progression. Every Indonesian also insists on this goal to implement its development in creating the community comparable with other more advanced nations. Planning will be a very determining factor to ensure the success or the failure of development project. A problem must be that the development planning may not be implemented effectively, thus constraining the development, or if can be conducted well, it should be failed to reach the objectives set in the planning. Therefore, the development planning requires public participation in determining the policy, plan, and program of development.

Research aims at understanding, describing, and analyzing the form of community participation in the development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency, and describing and analyzing the supporting and constraining factors in the participative development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency.

Research employs qualitative method with descriptive type of study. Data collection techniques include interview and observation, as well as the search for related documents. The focuses of research involve: (1) community participation in the development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency, reviewed from (a) plan setting, (b) plan program setting, (c) plan implementation, (d) the supervision over plan implementation, and (e) evaluation; and (2) the supporting and constraining factors in the participative development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency.

Results of research indicate that: (1) the development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency seems favorable with the compliance with the determined stages. The stages of planning involve the plan setting, plan program setting, plan implementation, the supervision over plan implementation, and evaluation. The community remains as a supporting factor to a development; (2) the development planning process of Telaga Ngebel Tourist Resort Site in Ponorogo Regency ensures the absence of hard constraints. Despite the lower social and cultural conditions and the education background of the immediate community, the government successfully socializes the development planning project to be understood by the immediate community and plays important role in the development planning process.

The only constraint, if possibly mentioned, relates to the limited funding because great project usually needs great money; (3) the community participation can be ascertained by: (a) using spatial order product as the manual in the physical development activity, (b) giving consideration or assistance to the structural form and spatial order of the resort, (c) supervising over the space utility, including the provisioning of information or report of development, (d) providing assistance in form of idea or consideration for the orderliness of space utility and the improvement of the quality of space utility, (e) disseminating the plan made by the government of Ponorogo Regency, (f) conducting the preparation to support the resort redefinition as stipulated in the Site Plan of Telaga Ngebel Tourist Resort, (g) considering this plan as the manual of investment, (h) controlling over any physical constructions around Telaga Ngebel Tourist Resort, (i) meeting the development requirement written in the document of Site Plan of Telaga Ngebel Tourist Resort.

Taking these into account, research may suggest that the activity of development must consider the social condition of the immediate community. Although the community may already accept and agree with the socialization, the community participation must be improved in the development planning of Telaga Ngebel Tourist Resort to ensure the success of planning and implementation. Indeed, the accessibility plays important role to develop a region. An important related to the resort development can be the accessibility to the road toward the resort. Transportation facility becomes a necessary factor because it facilitates tourist arrival to the resort. The government should also increase the annual events to stimulate this arrival. The stimulation will empower the attraction of tourist object offered by Telaga Ngebel Tourist Resort.



## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr. wb.

Puji syukur yang sebesar-besarnya kami panjatkan kepada ALLAH SWT atas karunia-Nya sehingga saya bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan semaksimal mungkin. Skripsi ini diajukan sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Administrasi Publik Universitas Brawijaya.

Judul skripsi ini adalah **“Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan (Studi tentang Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)”**.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan dapat terselesaikan dengan baik tanpa keterlibatan dari berbagai pihak yang berkenan membantu memberikan pemikiran, kritik, dan saran-saran, karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tuaku tercinta, Drs. Sukanto M.pd, dan Ibu Simi S.pd, serta adikku tersayang Lenny Dwi Agustin Damayanti, terima kasih atas doa dan dukungan kalian baik moral maupun materil.
2. Bapak Drs. Mochamad Makmur, Ms selaku Komisi pembimbing I atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Riyanto, M. Hum selaku Komisi pembimbing II atas masukan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ilmu Administrasi Publik atas segala ilmu yang diberikan.
6. Pemerintah daerah Kabupaten Ponorogo khususnya Bapeda, Dinas Pariwisata, Pemerintah Kecamatan Ngebel serta masyarakat Kecamatan Ngebel atas bantuan dan kerjasamanya.
7. Teman-teman Adminitrtasi Publik angkatan 2005, terima kasih atas segala bantuan, kenangan dan pengalamannya.
8. Teman-teman Sigura-gura VI 14 Gank yang telah mendukung dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

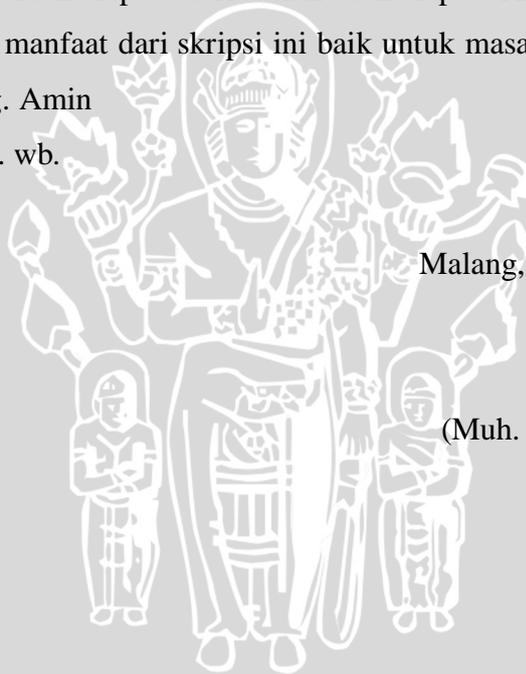
9. Orang-orang yang pernah singgah dihatiku, terima kasih atas semuanya, kalian adalah kenangan terindah yang takkan pernah aku lupakan.
10. Dan semua pihak yang membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga ALLAH SWT akan membalas budi baik semua pihak yang telah membantu pelaksanaan sampai dengan penyusunan skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis sudah berusaha sekuat tenaga untuk memperoleh hasil yang terbaik namun apabila masih kurang sempurna penulis sangat mengharapkan saran dan kritik dari semua pihak demi sempurnanya skripsi ini. Penulis juga memohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata datang dari saya, dan jika ada yang bermanfaat itu semata-mata datang dari ALLAH SWT. Karena penulis menyadari bahwa penulis hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan lupa. Akhir kata penulis mengharapkan banyak manfaat dari skripsi ini baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang. Amin

Wassalamualaikum wr. wb.

Malang, September 2009

(Muh. Zulkifli A Tomy)



## DAFTAR ISI

	Halaman
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI .....	i
TANDA PENGESAHAN .....	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS .....	iii
RINGKASAN.....	iv
SUMMARY .....	vi
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	x
DAFTAR TABEL .....	xii
DAFTAR GAMBAR .....	xiii
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Pembahasan .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Pembangunan .....	12
1. Konsep Pembangunan .....	12
2. Sasaran Pembangunan .....	14
3. Strategi Pembangunan .....	15
4. Perencanaan Pembangunan .....	16
5. Proses Perencanaan Pembangunan .....	18
B. Partisipasi .....	20
1. Konsep Partisipasi .....	20
2. Partisipasi Masyarakat .....	22
3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan .....	23
C. Pariwisata .....	27
1. Konsep Pariwisata .....	26
2. Jenis Pariwisata .....	33
3. Bentuk Pariwisata .....	34
4. Wisatawan .....	34
D. Perencanaan Pengembangan Pariwisata .....	35
E. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata.....	36
F. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel .....	39
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	42
B. Fokus Penelitian .....	42
C. Lokasi dan Situs Penelitian .....	43
D. Sumber Data .....	44
E. Teknik Pengumpulan Data .....	44

F. Instrumen Penelitian .....	46
G. Teknik Analisis Data .....	46
H. Keabsahan Data .....	48

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penyajian Data .....	51
1. Data Umum .....	51
1.1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo .....	51
1.2. Gambaran Umum Pariwisata Kabupaten Ponorogo .....	53
1.3. Gambaran Umum Kecamatan Ngebel .....	56
1.4. Wisata Telaga Ngebel .....	57
B. Data Fokus Penelitian .....	61
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel .....	61
1.1. Tahap Penyusunan Rencana .....	61
1.2. Tahap Penyusunan Program Rencana .....	63
1.3. Pelaksanaan Rencana .....	71
1.4. Pengawasan atas pelaksanaan rencana .....	78
1.5. Evaluasi .....	79
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	80
2.1. Faktor Pendukung .....	80
2.2. Faktor Penghambat .....	82
C. Analisa dan Interpretasi Data .....	83
1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel .....	83
1.1. Tahap Penyusunan Rencana .....	85
1.2. Tahap Penyusunan Program Rencana .....	86
1.3. Pelaksanaan Rencana .....	88
1.4. Pengawasan atas pelaksanaan rencana .....	91
1.5. Evaluasi .....	93
2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo .....	94
2.1. Faktor Pendukung .....	94
2.2. Faktor Penghambat .....	95

#### **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	97
B. Saran .....	98

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ponorogo	51
2	Letak Ketinggian dari Permukaan Laut/ <i>Altitudes</i>	51
3	Keadaan Geografis (Dengan Suhu Berkisar Antara / <i>Temperaure</i> )	51
4	Jumlah Penduduk Kecamatan Ngebel per Desa	57
5.	Rencana Pembentukan Kawasan dan Program-Programnya	70
6.	Tahapan dalam Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel	74



## DAFTAR GAMBAR

No	Judul	Halaman
1	Peta Lokasi Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo	60
2	Pembagian Zona Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo	69



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan salah satu wujud dari kemauan dan kemampuan suatu negara untuk dapat lebih berkembang lagi kearah yang lebih maju. Begitu juga dengan apa yang diinginkan bangsa indonesia untuk dapat melaksanakan pembangunan dalam rangka mewujudkan kehidupan masyarakat yang sederajat dan sejajar dengan bangsa – bangsa lain yang lebih maju. Untuk itu pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia realisasinya didasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila yang secara hakikat ingin mewujudkan suatu pembangunan manusia indonesia yang utuh dan menyeluruh.

Hakekat pembangunan nasional ini adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Ini berarti pembangunan mencakup pertama, kemajuan lahiriah seperti sandang, pangan, perumahan dll; kedua, kemajuan batiniah seperti pendidikan, rasa aman, rasa keadilan, rasa sehat; ketiga, kemajuan yang meliputi seluruh rakyat sebagaimana tercermin dalam perbaikan hidup berkeadilan sosial.

Karena luasnya ruang lingkup pembangunan maka pencapaiannya dilakukan secara bertahap. Pada tiap-tiap tahap diharap dapat dicapai keselarasan dalam kemajuan lahiriah dan batiniah yang merata mencakup seluruh rakyat Indonesia, dengan kadar keadilan yang meningkat. Dengan begitu pembangunan adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus. Untuk mencapai hasil maksimal maka usaha pembangunan yang dilakukan memerlukan perencanaan dengan memperhatikan prioritas pada kurun waktu tertentu.

Perencanaan merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu proyek pembangunan. Disamping perencanaan, ada beberapa faktor yang juga menentukan berhasil tidaknya suatu proyek pembangunan, yaitu, faktor koordinasi, pengawasan, pendanaan, SDM, SDA dan juga partisipasi dari masyarakat, dimana faktor-faktor tersebut saling berhubungan dan harus dapat dilakukan secara seimbang sehingga suatu proyek pembangunan

dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Diantara faktor-faktor tersebut, perencanaanlah yang merupakan faktor utama dan pertama dalam hal menentukan suatu pelaksanaan proyek pembangunan karena perencanaan dapat digunakan sebagai pedoman, arahan, pemilihan alternatif terbaik serta sebagai sebagai tolok ukur dalam upaya mencapai tujuan yang sesuai dengan harapan dan target yang telah ditetapkan.

Terkadang perencanaan pembangunan yang telah disusun tidak dapat diimplementasikan dengan efektif, sehingga pembangunan tidak bisa berjalan lancar, atau bisa berjalan tetapi tidak mencapai target-target yang telah ditentukan dalam perencanaan. Oleh karena itu dalam perencanaan pembangunan di usahakan agar setiap tahapannya memiliki kemampuan menopang pembangunan dalam tahap berikutnya. Karena itu disamping usaha meningkatkan kemajuan menjadi penting pula memantapkan kemajuan yang sudah dicapai.

Perencanaan pembangunan merupakan suatu proses yang berkesinambungan dari waktu ke waktu yang melibatkan kebijaksanaan dari pembuat keputusan berdasarkan sumber daya yang ada dan disusun secara sistematis dalam pelaksanaannya harus di sesuaikan dengan kemampuan aparatur dan dana yang diberikan. Perencanaan pembangunan juga harus bersifat komprehensif, mencakup semua aspek kehidupan yang dilaksanakan dalam suatu pola pembangunan nasional melalui program-program pembangunan yang sifatnya menyeluruh, terarah dan terpadu serta berkesinambungan yang didalamnya terkandung pendekatan sektoral maupun regional/daerah.

Arah perencanaan pembangunan daerah tertuang dalam TAP MPR NOMOR II/MPR/1998 tentang GBHN, bahwa :

“Pembangunan daerah diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran aktif masyarakat serta meningkatkan pendayagunaan potensi daerah secara optimal dan terpadu dalam mengisi otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa”

Dari pernyataan tersebut dapat dikatakan bahwa perencanaan daerah merupakan instrument yang utama dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan di daerah, serta peran aktif masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan tersebut, disamping itu

juga, dari pernyataan tersebut terlihat bahwa sangat penting pula untuk lebih mendayagunakan potensi daerah.

Di dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional pada penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf d partisipasi masyarakat diterjemahkan sebagai keikutsertaan masyarakat untuk mengakomodasikan kepentingan mereka dalam proses penyusunan rencana pembangunan. Dengan cara ini pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Masyarakat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Maka dalam proses perencanaan pembangunan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program - program pembangunan, karena menurut Siagian (2003: 2), dalam prespektif perencanaan pembangunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yakni: (a) sebagai pemanfaat hasil pembangunan (*beneficiaries*); dan (b) sebagai pelaku pembangunan (*actors, participant*).

Menurut pendapat Adimiharja (2003: 1) bahwa dalam paradigma pembangunan sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peopel centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan *non - material* yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. Sedangkan Adisasmita (2006: 34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Peningkatan partisipasi masyarakat adalah salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat. Peran masyarakat

dalam pembangunan sekarang ini bukan hanya sebagai obyek saja, tetapi juga merupakan sebagai subyek dari pembangunan tersebut.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan didasarkan atas beberapa alasan :

1. Masyarakat berhak mengetahui tentang setiap rencana pembangunan yang secara potensial mempengaruhi kehidupan mereka. Undang – undang no. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pasal 5 menyebutkan bahwa setiap orang mempunyai hak atas informasi yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup. Undang – undang yang baru secara eksplisit memberi akses terhadap informasi tentang proyek, program, dan kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.
2. Masyarakat adalah Local Expert tentang lingkungan disekitarnya, sehingga layak didengar pendapat dan gagasannya.
3. Keberlanjutan dari suatu proyek, program dan kebijakan akan terjamin jika masyarakat diikutsertakan.

Jadi, masyarakat tidak hanya sekedar merasakan hasil dari suatu program atau proyek pembangunan yang dilaksanakan tetapi lebih ditekankan pada keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan, pengambilan keputusan, implementasi hingga evaluasinya.

Dalam dasawarsa terakhir ini banyak negara berkembang menaruh perhatian yang khusus terhadap pembangunan industri pariwisata. Hal ini jelas terlihat dengan banyaknya program pengembangan kepariwisataan di negara tersebut. Untuk menggalakkan pembangunan perekonomian dengan suatu pertumbuhan yang berimbang dengan kepariwisataan dapat diharapkan memegang peranan yang menentukan dan dapat dijadikan sebagai katalisator untuk mengembangkan pembangunan sektor – sektor lain secara bertahap. Pertumbuhan yang berimbang bagi perekonomian itu dapat terjadi salah satunya sebagai akibat majunya pembangunan pariwisata.

Peranan pariwisata dalam pembangunan negara pada garis besarnya berintikan tiga segi, yakni segi ekonomis (sumber devisa, pajak – pajak), segi sosial (penciptaan lapangan kerja), dan segi kebudayaan(memperkenalkan kebudayaan kita kepada wisatawan asing). Dalam pembangunan nasional terdapat hubungan

interpendensi dengan pembangunan kepariwisataan, dalam artian bahwa pembangunan nasional dapat memperlancar pengembangan pariwisata dan berkembangnya kepariwisataan dapat memperlancar pembangunan nasional. Hal ini karena pembangunan pariwisata dapat memberikan manfaat yang besar dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan nasional, seperti semakin terbukanya lapangan pekerjaan, kesempatan berusaha bagi masyarakat, meningkatkan pendapatan baik masyarakat itu sendiri dan bagi negara. Untuk memperlancar pembangunan, pemerintah sangat memerlukan devisa yang besar baik untuk membiayai investasi maupun kebutuhan ekonomi lainnya, dan hal ini, ternyata pariwisata berperan dapat memberikan sumbangan pemasukan yang berarti pada devisa negara sebagai dampak kenaikan jumlah wisatawan baik dari dalam maupun luar negeri.

Spillane (1987: 133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata. Ketetapan MPR No. II/MPR/1998 tentang GBHN mengenai pengembangan pariwisata menetapkan beberapa aspek-aspek sebagai berikut:

- a. Pembangunan pariwisata diarahkan pada pengembangan pariwisata sebagai sektor andalan dan unggulan dalam arti luas yang mampu menjadi salah satu penghasil devisa, mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja, dan kesempatan berusaha, serta meningkatkan pengenalan dan pemasaran produk nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan tetap memelihara kepribadian bangsa, nilai – nilai agama, serta kelestarian fungsi dan mutu lingkungan hidup.
- b. Pembangunan kepariwisataan harus tetap menjaga terpeliharanya kepribadian dan budaya bangsa termasuk adat – istiadat setempat, nilai – nilai agama, terlindunginya kepemilikan aset masyarakat setempat, tertangkalnya dampak negatif yang ditimbulkan, serta terpeliharanya kelestarian lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu terus ditata secara menyeluruh dan terpadu dengan sektor yang terkait dalam suatu keutuhan usaha kepariwisataan yang mantap dengan semangat kemitraan usaha yang saling menunjang dan saling menguntungkan.
- c. Pengembangan pariwisata nusantara dilaksanakan untuk mendorong meningkatnya kegiatan perekonomian nasional serta pembangunan wilayah

sejalan dengan upaya meningkatkan pemerataan pembangunan dan pendapatan, memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa, serta menanamkan jiwa, semangat, dan nilai – nilai luhur sejarah dan budaya bangsa dalam rangka lebih memperkokoh persatuan dan kesatuan nasional.

- d. Pengembangan obyek wisata dan daya tarik wisata, kemudahan pencapaian serta kegiatan promosi dan pemasarannya, baik di dalam maupun di luar negeri, terus ditingkatkan secara terencana, terarah, terpadu, dan efektif.
- e. Pendidikan dan pelatihan usaha kapariwisata terutama pengusaha kecil, pengusaha menengah, dan koperasi perlu makin ditingkatkan, disertai penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik agar kemampuan sumber daya manusia kepariwisataan semakin tangguh, sehingga dapat menjamin mutu dan kelancaran pelayanan serta penyelenggaraan pariwisata.

Sesuai dengan tujuan pengembangan potensi kepariwisataan di Indonesia, sebagaimana dituangkan dalam UU No. 9 Tahun 1990, tentang kepariwisataan adalah :

1. Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu dan daya tarik wisata;
2. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
3. Memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan pekerjaan;
4. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat;
5. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Dari uraian di atas, tergambar bahwa salah satu usaha untuk meningkatkan devisa negara adalah dengan mengembangkan kepariwisataan. Dengan demikian pendapatan masyarakat secara otomatis akan dapat ditingkatkan. Sektor pariwisata merupakan salah satu alternatif cara yang bisa ditempuh untuk meningkatkan devisa disamping sektor migas. Pengembangan kepariwisataan dapat diarahkan pada peningkatan ekonomi termasuk kegiatan lain yang terkait, seperti penyediaan lapangan kerja, yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah dan pendapatan nasional.

Hal ini dimungkinkan karena dengan pengembangan kepariwisataan akan terjadi pula perluasan kesempatan kerja, sekaligus membuka peluang yang bagus bagi sektor – sektor lainnya. Menurut Wahab, pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang cepat dalam penyediaan lapangan kerja , peningkatan penghasilan, standar hidup serta

menstimulasi sektor – sektor produktif lainnya. Selanjutnya sebagai sektor yang kompleks, ia juga meliputi industri – industri klasik yang sebenarnya seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi secara ekonomi juga dipandang sebagai industri. Wahab (1975: 9)

Oleh karena itu, pariwisata akan sangat penting, bukan saja sebagai alat untuk menghasilkan devisa, tetapi diharapkan pemerintah bekerjasama dengan swasta, hendaknya juga memperhitungkan arti kepariwisataan sebagai alat untuk mengembangkan industri dan pelayanan baru seperti fasilitas, investasi, promosi, serta perbaikan sarana dan prasarana.

Selain itu dalam pengembangan kepariwisataan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau tidaknya pengembangan pariwisata. Faktor-faktor yang mempengaruhi skala prioritas dalam pengembangan pariwisata antara lain :

1. Motivasi kunjungan wisata
2. Aksesibilitas
3. Potensi dan aset wisata
4. Tingkat keintiman masyarakat
5. Pelayanan umum
6. Peranan pemerintah
7. Peranan swasta

Salah satu bidang pengembangan pembangunan yang digunakan oleh pemerintah daerah, khususnya Pemerintah Kabupaten Ponorogo adalah upaya pengembangan dibidang pariwisata. Namun potensi wisata yang ada di daerah ponorogo belum tertangani secara maksimal. Berdasarkan pertimbangan bahwa kawasan wisata akan mampu menarik perkembangan ekonomi wilayah sekitarnya, maka pengembangan kegiatan perlu mendapatkan prioritas penanganan berdasarkan perencanaan yang baik. Selanjutnya potensi obyek dan daya tarik wisata perlu digali, dilindungi, dikelola dan dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna secara terpadu, menyeluruh, terencana, dan berkesinambungan.

Wisata alam Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo ditinjau dari segi kualitas maupun kuantitas sangat berpotensi untuk pengembangan pariwisata baik regional maupun nasional yang sekaligus sebagai salah satu penyebaran lokasi wisata dan pemerataan pendapatan masyarakat. Pengembangan obyek wisata

Telaga Ngebel yang akan direncanakan harus melihat potensi yang ada di lingkungan sendiri maupun fakta lingkungan eksternal yang ada. Oleh karena itu, perlu diadakan kajian yang lebih mendalam mengenai seberapa potensi yang dimiliki, dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.

Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, merupakan upaya pengembangan potensi wisata Telaga Ngebel yang khas/khusus untuk ditonjolkan dan dipromosikan, serta menunjukkan nilai-nilai potensial kawasan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu upaya ini dapat digunakan untuk mendorong perkembangan wisata yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang menghendaki adanya usaha serius dari pemerintah dan pihak swasta untuk pengembangan potensi wisata. Sehingga secara langsung atau tidak langsung pengembangan pariwisata ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dengan munculnya usaha *multiplier effect*. Selain itu juga bisa digunakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor lain, yaitu membuka kesempatan kerja/ lapangan usaha baru bagi warga sekitar obyek wisata dan warga Kabupaten Ponorogo secara umum, untuk memasarkan hasil industri rumah tangga dan kerajinan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Kawasan Wisata Telaga Ngebel selain berfungsi sebagai obyek wisata juga berfungsi sebagai konservasi. Fungsi wisata menunjuk pada aktivitas intervensi terhadap potensi tapak dalam rangka menarik dan meningkatkan jumlah pengunjung/wisatawan. Sedangkan fungsi konservasi merujuk pada upaya – upaya untuk mempertahankan dan melestarikan potensi-potensi alam yang ada.

Sebagai fungsi wisata, Kawasan Wisata Telaga Ngebel memiliki keterbatasan atraksi yang dapat dijadikan sebagai daya tarik wisata. Selain itu, bentuk tapak kawasan wisata yang merupakan faktor yang sangat berpengaruh pada kenyamanan dan kepuasan pengunjung kurang atau belum direncanakan secara optimal. Oleh karena itu, perlu dikembangkan bentuk tapak kawasan yang sesuai pada lokasi dan dapat memberikan pelayanan optimal bagi pengunjung obyek wisata.

Kawasan Wisata Telaga Ngebel selain berfungsi sebagai konservasi, juga berfungsi sebagai Pembangkit Tenaga Listrik. Oleh karena itu, dengan didukung faktor lingkungan yang asri, perlu direncanakan konsep dan upaya konservasi lingkungan di Sekitar Kawasan Telaga Ngebel. (*Laporan Akhir Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel Tahun 2007*)

Mengingat aspek partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan memegang peranan penting dalam usaha pembangunan pariwisata, maka penelitian ini mengambil judul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi tentang Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo)”**.

### **B. Rumusan Masalah**

Berkaitan dengan latar belakang serta fenomena diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo?
2. Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dengan memperhatikan rumusan masalah diatas maka tujuan yang hendak dicapai melalui penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis Faktor pendukung dan faktor Penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan kawasan Tapak Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

#### D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat adalah :

1. Manfaat Akademis
  - a. Memberikan informasi ilmiah bagi dunia pendidikan khususnya dibidang administrasi publik dalam mengembangkan teoritis yang lebih luas dan mendalam khususnya yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif.
  - b. Memperkaya khasanah keilmuan khususnya bagi yang berminat di bidang kajian yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan partisipatif.
2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan, acuan dan dasar bagi instansi yang terkait agar dapat merumuskan dan mengambil langkah-langkah yang tepat, terkait rencana pengembangan kawasan tapak wisata telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.

#### E. Sistematika Penulisan dan Pembahasan

**BAB I** :Pendahuluan, bab ini merupakan kerangka dasar penulisan skripsi yang memuat aspek-aspek: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan dan pembahasan yang menguraikan hal-hal yang dicantumkan pada setiap bab dan alasan penempatan bab serta keterjalinan antara bab.

**BAB II** :Tinjauan Pustaka berisi tentang teori - teori dan konsep atau temuan ilmiah dari buku yang berkaitan dengan judul penelitian, yakni tentang konsep pembangunan, perencanaan, partisipasi dan mengenai konsep pengembangan kawasan wisata.

**BAB III** :Dalam bab ini membicarakan tentang metode penelitian yang terdiri dari fokus penelitian, lokasi penelitian, metode penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, dan analisis data. Pendekatannya kualitatif dan metode pengumpulan data yang terdiri dari sumber data penelitiannya yang diperoleh dari data skunder, teknik pengumpulan datanya diperoleh dari hasil

wawancara dan observasi dengan memaparkan biografi subyek penelitian serta penyebaran kuesioner. Kemudian teknik pengolahan data dan analisis datanya menggunakan deskriptif kualitatif.

**BAB IV** :Hasil dan Pembahasan yang berisi tentang proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo , menelaah tentang bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata dan menganalisa kendala - kendala apa saja yang dihadapi dalam proses partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

**BAB V** :Kesimpulan dan Saran.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pembangunan

##### 1. Konsep Pembangunan

Pembangunan diartikan sebagai suatu proses multidimensional yang meliputi perubahan dalam struktur sosial, perubahan dalam sikap hidup masyarakat dan perubahan dalam kelembagaan nasional. Selain itu, pembangunan juga meliputi perubahan dalam tingkat pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketimpangan pendapatan nasional dan pemberantasan kemiskinan, Guna suatu negara dapat diarahkan pada tiga hal pokok, yaitu meningkatkan ketersediaan dan distribusi kebutuhan pokok bagi masyarakat, meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses baik kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial dalam kehidupannya.

Pembangunan sering diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik. Siagian (2003: 4) mendefinisikan pembangunan sebagai rangkaian usaha mewujudkan pertumbuhan dan perubahan secara terencana dan sadar yang ditempuh oleh suatu negara bangsa menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*). Ginanjar Kartasasmita (1996) memberikan pengertian yang lebih sederhana yaitu sebagai suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana.

Tetapi apabila pembangunan didefinisikan secara sederhana, maka akan memunculkan paling sedikit tujuh ide pokok, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses yang berarti bahwa pembangunan merupakan rangkaian kegiatan yang berlangsung secara berkelanjutan dan terdiri dari tahap yang di satu pihak bersifat independen, akan tetapi di lain pihak merupakan bagian dari sesuatu yang bersifat tanpa akhir,
2. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar ditetapkan sebagai sesuatu untuk dilaksanakan,
3. Pembangunan dilakukan secara terencana, baik dalam arti jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek,
4. Rencana pembangunan mengandung makna pertumbuhan dan perubahan,

5. Pembangunan mengarah pada modernitas yang diartikan sebagai cara hidup yang baru dan lebih baik daripada sebelumnya, cara berfikir yang rasional dan sistem budaya yang kuat tetapi fleksibel,
6. Modernitas yang ingin dicapai melalui berbagai kegiatan pembangunan per definisi bersifat multidimensional yang artinya modernitas tersebut mencakup seluruh segi kehidupan berbangsa dan bernegara, dapat megejawantahkan dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan,
7. Semua hal yang telah tersebut di atas ditujukan kepada usaha pembinaan bangsa sehingga negara bangsa yang bersangkutan semakin kokoh fondasinya (Siagian, 2003: 5).

Arif Budiman dalam Saiful (2000: 108) menjelaskan bahwa pembangunan pada akhirnya mesti ditujukan pada manusianya itu sendiri. Manusia yang dibangun adalah manusia yang kreatif, dan untuk bisa kreatif mereka harus merasa bahagia, aman dan bebas dari rasa takut, karenanya mesti diciptakan lingkungan politik dan budaya yang kondusif, sehat, dan dinamis. Sebuah proses pembangunan semacam ini menggambarkan suatu kondisi dimana konsep pembangunan seyogyanya memperhatikan seluruh aspek pembangunan. Dengan demikian pendekatan pembangunan dapat dilakukan secara berkelanjutan terhadap seluruh aspek pembangunan tersebut.

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (2002: 10) mengatakan bahwa pembangunan adalah upaya suatu masyarakat atau bangsa yang merupakan suatu perubahan sosial yang besar dalam berbagai bidang kehidupan ke arah masyarakat yang lebih maju dan baik sesuai pandangan masyarakat atau bangsa itu.

Hal yang sama disampaikan oleh Suryono (2004: 26), yang menyimpulkan bahwa makna pembangunan sebagai citra pembangunan dalam perspektif diakronis (pembangunan menurut tahap pertumbuhan dan periode waktu), sebagai berikut :

- 1) Pembangunan sebagai proses perubahan sosial menuju ke tataran kehidupan masyarakat yang lebih baik.
- 2) Pembangunan sebagai upaya manusia sadar, terencana dan melembaga.
- 3) Pembangunan sebagai proses sosial yang bebas nilai (*value free*).

- 4) Pembangunan memperoleh sikap dan konsep transedental, sebagai *meta disciplinary phenomom*, bahkan memperoleh bentuk sebagai ideologi, *the ideologi of developmentalism*.
- 5) Pembangunan sebagai konsep yang sarat nilai (*value loaded*). Menyangkut proses pencapaian nilai yang dianut suatu bangsa semakin meningkat.
- 6) Pembangunan menjadi *cultur specific, situation specific* dan *time specific*.

## 2. Sasaran Pembangunan

Menurut Siagian (2003: 57) Pembangunan merupakan kegiatan yang multifaset dan multidimensional. Pembangunan pada hakekatnya adalah usaha untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat baik materiil maupun spiritual. Karakteristik demikian merupakan tuntutan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itulah sebabnya bidang-bidang yang menjadi obyek pembangunan adalah termasuk bidang politik, ekonomi, pertahanan dan keamanan, social budaya, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, administrasi pemerintahan

Sasaran pembangunan khususnya pembangunan desa adalah bagaimana masyarakat dimampukan agar secara mandiri mengarahkan dan memanfaatkan sumber - sumber yang ada untuk meningkatkan taraf hidupnya. Menurut Ismani (1991: 45) berpendapat bahwa :

“Sebagaimana diketahui dalam pembangunan pada umumnya terdapat subyek dan obyek atau pelaksana dan sasaran. Namun dalam pembangunan masyarakat, pelaksana dan sasarannya menjadi satu. Oleh karena itu masyarakat berperan ganda. Itulah sebabnya pembangunan masyarakat sebagai modernisasi dan juga perubahan sosial (*social change*) yang dilakukan pemerintah bersama - sama dengan masyarakat”.

Menurut Sumodiningrat (1999: 172), inti dari sasaran pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Maka dari itu salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dalam pengembangan pariwisata adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di

tingkat daerah, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

### 3. Strategi Pembangunan

Menurut Slamet (1980: 110), strategi pembangunan adalah keseluruhan langkah - langkah pokok (kebijaksanaan) dan pelaksanaan yang melalui perhitungan yang pasti digunakan untuk mencapai tujuan atau mengatasi sesuatu persoalan (*policy decision and xecution*). Dalam penyusunan strategi pembangunan nasional suatu negara, kita dapat memilih beberapa pendekatan secara alternatif yang masih berorientasi kepada teori. Yaitu berupa *Growth theory, Rural Development Theory, Agro - First Theory, Basic Needs Theory* dan sebagainya. Namun strategi pembangunan (*development*) sesungguhnya beraneka - ragam menurut pandangan masing - masing. Pembangunan itu sesungguhnya adalah suatu proses dinamis, karenanya konsep pembangunan sebaiknya tidak boleh dilihat sebagai konsep statis. Di dalam proses pembangunan mutlak adanya unsur - unsur pembaharu yang tidak saja terdiri dari elemen pemerintah, namun yang lebih penting juga harus didukung secara aktif dan terus - menerus oleh masyarakat sendiri sebagai kekuatan pembaharuan yang potensial.

Menurut Rothman (1974: 132), Melakukan reklasifikasi strategi pembangunan yang terdiri atas empat buah strategi pembangunan yaitu: strategi pembangunan gotong - royong, strategi teknikal - profesional, strategi konflik dan strategi pembelotan kultural.

Strategi gotong - royong melihat masyarakat sebagai suatu sistem sosial yang terdiri atas bagian - bagian yang terintegrasi secara normatif, dimana tiap - tiap bagian memberikan sumbangan fungsional masing - masing bagi pencapaian tujuan masyarakat sebagai keseluruhan.

Strategi Teknikal - Profesional memberikan tekanan yang lebih besar pada perlunya diciptakan sistem penyelesaian masalah dimana kelompok -kelompok masyarakat mengembangkan norma - norma, peranan - peranan dan prosedur - prosedur kerja baru untuk mengembangkan tanggapan - tanggapan baru terhadap situasi - situasi baru yang terus - menerus berubah. Hal ini terjadi karena strategi

teknikal - profesional mempunyai perbedaan dalam memandang watak manusia dibanding dengan strategi gotong - royong.

Strategi konflik berawal dari anggapan bahwa paksaan atau kekuasaan adalah merupakan landasan yang lebih realistis bagi tertib sosial setiap masyarakat. Selain itu kekuasaan - kekuasaan masyarakat terlalu memberikan tekanan pada pemeliharaan stabilitas sosial daripada pembagian yang lebih merata didalam mengatur hubungan - hubungan antara kelompok dengan sumber - sumber daya masyarakat yang menghasilkan konsentrasi kekuasaan yang semakin besar ditangan segelintir orang atau sejumlah kecil kelompok kepentingan tertentu.

Strategi pembelotan kultural memandang manusia menurut kodratnya bersifat emosional dan spiritual, oleh karena itu masyarakat modern telah berkembang berlawanan dengan kondisi - kondisi struktural memungkinkan para anggota masyarakat mengembangkan kemungkinan - kemungkinan kemanusiaan mereka.

#### **4. Perencanaan Pembangunan**

Perencanaan pembangunan memang suatu usaha sebagai refleksi dari peran Pemerintah dalam mendorong gerak pembangunan ke arah tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa proses atau usaha pembangunan yang berencana adalah proses usaha masyarakat yang luas. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus pula dilihat dalam konteks dinamika proses pembangunan dari sesuatu masyarakat bangsa.

Perencanaan berasal dari kata rencana, yang berarti rancangan atau rangka sesuatu yang akan dikerjakan. Dari pengertian sederhana tersebut dapat diuraikan beberapa komponen penting, yakni tujuan (apa yang hendak dicapai), kegiatan(tindakan - tindakan untuk merealisasi tujuan), dan waktu (kapan, bilamana kegiatan tersebut hendak dilakukan). Apa yang direncanakan tentu saja merupakan tindakan - tindakan di masa depan (untuk masa depan).

Suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Data atau informasi akan menjadi penentu dalam proses ini. Semakin akurat data yang ada, akan semakin baik perencanaan bisa disusun. Hardjanto (2008: 54).

Menurut Siagian (2003: 50), perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan di dalam dan oleh suatu organisasi dalam pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Menurut Siagian suatu perencanaan sedikitnya mempunyai tiga karakteristik, yaitu:

- 1) Rencana berkaitan langsung dengan tujuan yang hendak dicapai karena eksistensi seluruh organisasi justru adalah untuk mencapai tujuannya;
- 2) Rencana selalu mengandung keputusan tentang kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan tindakan-tindakan yang akan diambil betapapun tentatifnya keputusan tersebut;
- 3) Segala sesuatu yang termuat di dalam rencana merupakan hasil perhitungan yang matang dengan pengertian bahwa perhitungan yang dibuat tidak bersifat absolut yang berarti terbuka kemungkinan untuk ditinjau kembali serta disesuaikan dengan perkembangan keadaan.

Menurut Ginanjar Kartasasmita (1996: 49) Perencanaan pembangunan pada umumnya harus memiliki, mengetahui dan memperhitungkan beberapa unsur pokok, yaitu:

1. Tujuan akhir yang dikehendaki,
2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya  
(yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif),
3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut,
4. Masalah-masalah yang dihadapi,
5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya,
6. Kebijakan-kebijaksanaan untuk melaksanakannya,
7. Orang, organisasi atau badan pelaksanaannya,
8. Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan tersebut selayaknya menyertakan keterlibatan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Abe (2001: 30), bahwa makna perumusan bukanlah suatu makna yang akademis sifatnya, melainkan proses, dimana pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok harapan, kebutuhan, dan kepentingan dasarnya. Apa yang dimaksud tidak lain dari adanya keterlibatan rakyat dalam proses perencanaan.

Dari beberapa pengertian di atas maka tiga ciri utama perencanaan (dalam merencanakan) adalah (1) harus menyangkut hari depan ; (2) harus menyangkut

tindakan atau aksi ;(3) satu badan tertentu harus bertanggungjawab untuk melakukan tindakan dikemudian hari. Masih banyak pengertian kaitannya dengan perencanaan, hal ini disebabkan karena perencanaan amat dinamis dan berkembang sejalan dengan fenomena-fenomena yang berkembang di masyarakat.

## 5. Proses Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah suatu proses kegiatan usaha yang terus-menerus dan menyeluruh dari penyusunan suatu rencana, penyusunan program kegiatan, pelaksanaan serta pengawasan dan evaluasi pelaksanaannya. Menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1996: 57) Secara terperinci dapat dikemukakan tahap-tahap dalam suatu proses perencanaan sebagai berikut:

### 1) Penyusunan rencana

- a) Tinjauan keadaan. Tinjauan keadaan atau *review* ini seperlunya diadakan sebelum melakukan suatu rencana. Dengan kegiatan ini dapat mengetahui masalah - masalah pokok dan diklasifikasikan sesuai dengan jenisnya atau hambatan - hambatan dan potensi - potensi serta prospek yang masih ada yang mungkin masih dapat dikembangkan
- b) *Forecasting* (peramalan), kegiatan ini menuntun seorang perencana untuk melihat keadaan yang akan datang, berdasarkan masalah - masalah yang telah dihadapinya dan membuat perkiraan - perkiraan guna mengatasi masalah tersebut.
- c) Penetapan tujuan rencana apabila perencana sudah meninjau keadaan secara baik dan sudah membuat perkiraan - perkiraan di masa yang akan datang maka unsur ketiga dapat dilaksanakan, sesuai dengan nilai - nilai politik sosial masyarakat yang bersangkutan.
- d) Identifikasi kebijakan, hal ini sebenarnya dilakukan apabila perencana sudah mengklasifikasikan semua masalah dan sudah menentukan skala prioritas dari masalah - masalah yang dihadapi.
- e) Persetujuan rencana, kegiatan ini menyangkut proses pengambilan keputusan. Hal mana mungkin menjadi masalah bagi setiap organisasi baik pemerintah maupun swasta, oleh karena itu dalam pengambilan

keputusan menyangkut dengan rencana harus benar - benar nilainya dapat menjawab masalah yang dihadapi dan dapat mengatasi.

Disini diusahakan pula penyerasian dengan perencanaan pembiayaan secara umum daripada program-program perencanaan yang akan dilakukan.

#### 2). Penyusunan program rencana.

Dalam tahap ini dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

#### 3). Pelaksanaan Rencana.

Dalam hal ini seringkali perlu dibedakan antara tahap eksplorasi, tahap konsrtuksi dan tahap operasi. Hal ini perlu dipertimbangkan karena sifat kegiatannya berbeda. Dalam tahap pelaksanaan operasi perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian.

#### 4). Pengawasan atas pelaksanaan rencana.

Tujuan dari pengawasan adalah:

- a) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya,
- b) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya,
- c) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Untuk itu diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksanaan rencana.

#### 5). Evaluasi

Evaluasi membantu kegiatan pengawasan. Evaluasi juga dilakukan sebagai pendukung tahap penyusunan rencana yaitu evaluasi tentang situasi situasi sebelum rencana dimulai dan evaluasi tentang pelaksanaan rencana sebelumnya.

Dari hasil evaluasi dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri.

Menurut Tjokrowinoto (1996: 41) pentingnya perencanaan pembangunan yang melibatkan masyarakat, bahwa :

“keterlibatan pemerintah yang begitu dominan telah menimbulkan ketergantungan masyarakat desa pada pemerintah, terutama dalam hal pengalokasian dana pembangunan yang bertumpu pada alokasi dan distribusi dana yang selama ini dilakukan secara sentralistik, sehingga memberi dampak terhadap kreativitas dan komitmen masyarakat semakin kurang dalam pembangunan perdesaan”.

Oleh karena itu, dalam proses perencanaan pembangunan, sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program - program pembangunan, karena menurut Siagian (2003: 2), dalam prespektif perencanaan pembangunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yakni: (a) sebagai pemanfaat hasil pembangunan (*beneficiaries*); dan (b) sebagai pelaku pembangunan (*actors, participant*).

## **B. Partisipasi**

### **1. Konsep Partisipasi**

Konsep partisipasi sebagai fokus sangat perlu untuk dipahami sebelum kita mengkaji lebih lanjut. Suatu perencanaan akan punya makna jika dalam proses perencanaan tersebut melibatkan masyarakat sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat. Namun demikian perencanaan yang baik agar dapat menjamin keberpihakan pada masyarakat maka masyarakat harus mendapat akses dalam memonitor pelaksanaan.

Pengertian partisipasi menurut Mubaryanto (1998: 35) adalah sebagai kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri. Dari pengertian tersebut terkandung makna bahwa partisipasi harus muncul sebagai kesadaran, kerelaan setiap anggota masyarakat untuk ikut serta mensukseskan pembangunan tanpa adanya paksaan.

Menurut Sumarto dalam Sembodo (2006: 21) bahwa partisipasi merupakan suatu proses yang memungkinkan adanya interaksi yang lebih baik antar *stakeholders* sehingga kesepakatan - kesepakatan dan tindakan yang bersifat inovatif lebih mungkin tercipta dalam proses *deliberatif*, dimana ruang untuk mendengarkan, belajar, refleksi dan memulai suatu aksi bersama terjadi.

Dalam Ndraha (1990: 103), mengemukakan tentang jenis - jenis partisipasi, antara lain:

1) Partisipasi Informatif

Adalah jenis partisipasi yang menunjukkan kesediaan seorang untuk memberikan data dan informasi sesuai kenyataan sesungguhnya, seperti diketahui bahwa awal kegiatan suatu pelaksanaan pembangunan di mulai dari perencanaan.

2) Partisipasi Advsori

Partisipasi jenis ini dimaksudkan sebagai pemberian kesempatan seseorang pada suatu kelompok untuk mengajukan saran atau usul guna mendukung kelancaran kegiatan perencanaan.

3) Partisipasi dalam Perencanaan

Telah dikemukakan bahwa dalam kegiatan perencanaan sangat diperlukan data dan informasi yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Dengan demikian penyusunan rencana, selain dapat berjalan lancar juga dapat menghasilkan rencana yang mencerminkan masyarakat itu sendiri.

4) Partisipasi dalam Pelaksanaan

Rencana yang dihasilkan melalui proses perencanaan dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara utuh akan dapat melibatkan anggota masyarakat tersebut dalam kegiatan. Hal ini mengandung arti psikologis, sebab anggota masyarakat semakin menyadari bahwa keberadaan mereka pada kegiatan perencanaan itu mendapat perhatian dari pimpinan, karenanya dalam kegiatan pelaksanaan suatu program partisipasinya dalam segala bentuk baik kesediaannya bekerja secara fisik ataupun pemberian sumbangan uang, barang ataupun barang - barang material akan semakin bertambah.

5) Partisipasi dalam penilaian

Partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan atas hasil pelaksanaan rencana yang telah dilaksanakan berdasarkan pada hasil perbandingan antara hasil dan ketentuan - ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, termasuk pula dalam hal ini adalah perencanaan itu sendiri.

6) Partisipasi dalam menerima hasil pembangunan

Partisipasi ini dimaksudkan sebagai bentuk kesediaan, kesempatan dan kemampuan atau keterlibatan masyarakat dalam menerima pembangunan, merasakannya seolah-olah menjadi miliknya sendiri untuk kemudian mengelolanya secara bertanggungjawab artinya memelihara / kelestariannya.

Conyers (1992: 154) mengemukakan alasan pentingnya partisipasi yaitu:

1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi, kondisi,kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program serta proyek pembangunan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai program serta proyek pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek tersebut.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

## 2. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat adalah mitra pemerintah dalam penataan ruang, oleh karena itu peran sertanya dalam setiap tahapan penataan ruang dan tingkatan penyelenggaraan perlu dikembangkan demi tercapainya tujuan penataan ruang.

Partisipasi masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa pergerakan dalam pembangunan, yang menggambarkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai salah satu proses pembangunan di berbagai negara, yang tidak segera bergerak. Oleh karena itu partisipasi dalam pembangunan perlu dibangkitkan terlebih dahulu oleh pihak lain. Pihak lain tersebutlah yang mengambil prakarsa dan masyarakat diminta atau diberi kesempatan berpartisipasi (turut serta). Berbagai sumber menyatakan, pergerakan partisipasi masyarakat merupakan salah satu sasaran pembangunan itu sendiri.

Bentuk partisipasi masyarakat dapat ditunjukkan utamanya dalam pembuatan keputusan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Domai (1992: 252) dimana perilaku anggota masyarakat berupa ambil bagian aktif dalam hal pembuatan keputusan merupakan bentuk partisipasi.

Dalam konteks pembangunan Adisasmita (2006: 38) mengatakan partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan pelibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dikerjakan di masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari ketersediaan dan kemauan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program atau proyek. Dikatakan pula bahwa partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan masyarakat, peran sertanya dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program / proyek pembangunan, dan merupakan aktualisasi kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi pembangunan.

Menurut Ndraha (1990: 103), terdapat beberapa tahap partisipasi yaitu sebagai berikut:

- 1) Partisipasi dalam atau melalui kontak dengan pihak lain (*contact change*) sebagai salah satu titik awal perubahan (Rongers, 1965 dan Staudt).
- 2) Partisipasi dalam memperbaiki atau menyerap dan memberi tanggapan terhadap informasi baik dalam arti menerima (mentaati, memenuhi, melaksanakan, mengiyakan, menerima dengan syarat), maupun dalam arti menolaknya (Evelin Wood, dalam Kuruksherton, 1962).
- 3) Partisipasi dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam pengambilan keputusan (penetapan rencana, Hof Stude, 1977). Perasaan terlibat dalam perencanaan perlu ditimbulkan sedini mungkin didalam masyarakat (Miller dan Rein dalam Golembieusky, 1966). Partisipasi ini disebut juga partisipasi dalam pengambilan keputusan (Cohen dan Uphoff, 1977), termasuk keputusan politik yang menyangkut mereka (Mubyarto, 1984), partisipasi yang bersifat teknis didesain proyek (Mosha dan Matte, 1977).
- 4) Partisipasi dalam melaksanakan operasional pembangunan (Cohen dan Uphoff, 1977).
- 5) Partisipasi dalam menerima, memelihara dan mengembangkan hasil pembangunan Cohen dan Uphoff menamakan "*participation in benefits*".

Partisipasi masyarakat merupakan proses dan keadaan yang harus selalu dikembangkan, dan pengembangannya memerlukan waktu, sumberdaya, pemahaman dan ketekunan. Oleh karena itu, agar partisipasi masyarakat dapat berkembang dengan baik, maka perlu diperhatikan prinsip - prinsip partisipasi

### 3. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan

Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Conyers (1992: 154) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan :

- 1) Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek - proyek pembangunan akan gagal.
- 2) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa bantuan masyarakat sulit diharapkan bila mereka tidak diikutsertakan.
- 3) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif, Sumodiningrat (1999) mengajukan 5 (lima) prinsip yang dapat dipakai sebagai pegangan, yaitu:

1. Kebijakan pembangunan harus berpihak pada rakyat.
2. Pedoman pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
3. Mekanisme perencanaan pembangunan merupakan perpaduan antara mekanisme *top down* dan *bottom up*.
4. Tim koordinator dan pengendali harus terkoordinasi antar sektor dan antar wilayah.
5. Instrumen pembangunan harus yang menjunjung tinggi keberpihakan kepada rakyat.

Menurut Abe (2005: 77) Perencanaan partisipatif adalah perencanaan yang tujuannya melibatkan rakyat dan dalam prosesnya melibatkan rakyat. Pelibatan kepentingan masyarakat ini penting untuk dicermati karena selama ini keterlibatan masyarakat khususnya masyarakat bawah (*grass root*) hanya dipakai legalisasi formal serta manipulasi bahwa perencanaan tersebut telah melibatkan rakyat. Sedangkan perencanaan partisipatif yang seharusnya adalah perencanaan yang dapat menggali potensi masyarakat yang selami terpendam karena tekanan politik, untuk kepentingan bersama dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan untuk diuruskan sedemikian hingga tidak menyimpang dari apa yang diinginkan. Dalam perencanaan partisipatif, ada dua format :

- 1) Perencanaan yang langsung disusun bersama masyarakat:
  - a) Perencanaan lokasi – setempat, merupakan perencanaan yang menyangkut daerah dimana masyarakat berada.
  - b) Perencanaan wilayah, merupakan perencanaan yang disusun dengan melibatkan masyarakat secara perwakilan.
- 2) Perencanaan yang disusun melalui mekanisme perwakilan, dalam format perencanaan ini, masyarakat perlu melakukan dua hal yaitu mengorganisir perencanaan setempat dan melakukan tekanan pada parlemen dan eksekutif.

Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990: 104) menguraikan bentuk - bentuk partisipasi yang terbagi dalam empat bentuk, yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pembuatan keputusan (*participation in decision making*)
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan (*participation in implementation*)
- 3) Partisipasi dalam menerima manfaat (*participation in benefits*)
- 4) Partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*).

Bentuk - bentuk partisipasi yang disebutkan diatas secara garis besar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diimplementasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan.

Pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Di lain pihak perencanaan pembangunan dapat merangsang dan memperluas keterlibatan aktif itu, apabila benar-benar mencerminkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan masyarakat.

Menurut Susanto dan Asep (2000: 35) terdapat beberapa prinsip yang perlu dijadikan pedoman dalam melibatkan masyarakat dalam mengembangkan suatu proses perencanaan pembangunan, yaitu:

- 1) Partisipasi utuh (*full participation*), yaitu proses pengambilan keputusan melibatkan semua pihak yang akan terlibat dan terkena dampak pelaksanaan program / proyek yang akan dilaksanakan, termasuk di dalamnya melibatkan perempuan, remaja, dan kelompok - kelompok masyarakat yang sering diabaikan.
- 2) Adanya saling pengertian (*mutual understanding*), yaitu adanya kesempatan untuk melakukan kegiatan yang bersifat awet (terus menerus) dimana para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan perlu menerima secara terbuka pikiran - pikiran, cita - cita dan harapan yang berkembang dalam proses pengambilan keputusan.
- 3) Pembuatan keputusan didasarkan pada kesimpulan yang benar dan bijaksana (*inclusice solution*), yaitu proses pengintegrasian antara perspektif dan kebutuhan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan sebagai hal tersebut akan berpeluang melahirkan solusi - solusi variatif yang sesuai dengan visi dan karakteristik para pihak yang terlibat dalam suatu kegiatan.
- 4) Adanya pembagian tanggung jawab bersama (*share responsibility*) diantara pihak - pihak yang terlibat.

Dari beberapa prinsip perencanaan pembangunan partisipatif tersebut, terlihat bahwa dengan adanya keterlibatan masyarakat yang besar dan bersifat sukarela, perencanaan pembangunan partisipatif pada dasarnya sangat diwarnai oleh kebutuhan untuk menjangkau aspirasi masyarakat secara tepat dan maksimal. Demikian pula, perencanaan pembangunan partisipatif sangat disandarkan pada pandangan bahwa masyarakat merupakan gambaran keanekaragaman yang selalu

berubah dan berkembang dalam semangat kehidupan dan interaksi yang demokratis.

#### 4. Pariwisata

##### 1. Pengertian Pariwisata

Pengertian tentang Pariwisata dan wisatawan timbul di Perancis pada akhir abad ke 17. Tahun 1972 Maurice Menerbitkan buku petunjuk "*The True Guide For Foreigners Travelling in France to Appreciate its Beaalities, Learn the language and take exercise*. Dalam buku ini disebutkan ada dua perjalanan yaitu perjalanan besar dan kecil (*Grand Tour* dan *Perit Tour*). *Grand Tour* di Inggris Mendapat arti yang berbeda yaitu dijadikan unsure pendidikan diplomasi dan politik. Pertengah abad ke-19 Jumlah orang yang berwisata masih terbatas karena butuh waktu lama dan biaya besar, keamanan kurang terjamin, dan sarannya masih sederhana, tetapi sesudah Revolusi Industri Keadaan itu berbuah, tidak hanya golongan elit saja yang bisa berpariwisata tapi kelas menengah juga. Hal ini ditunjang juga oleh adanya kereta api. Pada abad Ke-20 terutama setelah perang dunia II kemajuan teknik produksi dan teknik penerbangan menimbulkan peledakan pariwisata. Perkembangan terkahir dalam pariwisata adalah munculnya perjalanan paket (*Package tour*).

(<http://mangkutak.wordpress.com/2009/01/05/dasar-pengertian-pariwisata/>)

Pariwisata pada saat ini merupakan suatu kebutuhan mutlak manusia, baik yang melakukan perjalanan wisata maupun masyarakat sekitar daerah tujuan wisata. Wisatawan butuh dipuaskan keinginannya, sementara masyarakat sekitar lokasi berharap akan mendapatkan implikasi positif berupa peningkatan pendapatan dan kesejahteraan. Fenomena ini harus menjadi perhatian para penentu kebijakan sebagaimana diamanatkan bahwa pembangunan kepariwisataan nasional diarahkan untuk menjadi sektor andalan dan unggulan yang secara luas akan diterjemahkan sebagai penghasil devisa terbesar yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan daerah, memberdayakan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Menurut WATA (*World Association of Travel Agent* = Perhimpunan Agen Perjalanan Sedunia), wisata adalah perjalanan yang dilakukan seorang atau

sekelompok orang lebih dari tiga hari dengan menggunakan kendaraan pribadi, umum, atau biro tertentu dengan tujuan untuk melihat-lihat berbagai tempat atau suatu kota baik di dalam negeri maupun diluar negeri.

Menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata Bab I Pasal 1 ; dinyatakan bahwa wisata adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata

Jadi pengertian wisata itu mengandung unsur yaitu : (1) Kegiatan perjalanan; (2) Dilakukan secara sukarela; (3) Bersifat sementara; (4) Perjalanan itu seluruhnya atau sebagian bertujuan untuk menikmati obyek dan daya tarik wisata.

Sedangkan Menurut definisi yang luas pariwisata adalah perjalanan dari satu tempat ke tempat lain, bersifat sementara, dilakukan perorangan maupun kelompok, sebagai usaha mencari keseimbangan antara keserasian dan kebahagiaan dengan lingkungan hidup dalam dimensi sosial budaya, alam dan ilmu.

Menurut Salah Wahab (1975: 55) mengemukakan definisi pariwisata yaitu pariwisata adalah salah satu jenis industri baru yang mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi dan penyediaan lapangan kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta menstimulasi sektor-sektor produktif lainnya. Selanjutnya, sebagai sektor yang kompleks, pariwisata juga merealisasi industri-industri klasik seperti industri kerajinan tangan dan cinderamata, penginapan dan transportasi.

Menurut pendapat dari James J.Spillane (1987: 20) mengemukakan bahwa pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, memperbaiki kesehatan, menikmati olahraga atau istirahat, menunaikan tugas, berziarah dan lain-lain.

Pariwisata menurut Robert McIntosh bersama Shaskinant Gupta dalam Oka A.Yoeti (1992: 8) adalah gabungan gejala dan hubungan yang timbul dari interaksi wisatawan, bisnis, pemerintah tuan rumah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik dan melayani wisatawan-wisatawan serta para pengunjung lainnya.

Sedangkan pengertian Kepariwisata menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 1990 pada bab I pasal 1, bahwa Kepariwisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan penyelenggaraan pariwisata. Artinya semua kegiatan dan urusan yang ada kaitannya dengan perencanaan, pengaturan, pelaksanaan, pengawasan, pariwisata baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta dan masyarakat disebut Kepariwisata.

Nyoman S. Pendit (2003: 33) menjelaskan tentang kepariwisataan sebagai berikut :

Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan langsung terhadap kemajuan pembangunan atau perbaikan pelabuhan pelabuhan (laut atau udara), jalan-jalan raya, pengangkutan setempat, program program kebersihan atau kesehatan, pilot proyek sasana budaya dan kelestarian lingkungan dan sebagainya. Yang kesemuanya dapat memberikan keuntungan dan kesenangan baik bagi masyarakat dalam lingkungan daerah wilayah yang bersangkutan maupun bagi wisatawan pengunjung dari luar. Kepariwisata juga dapat memberikan dorongan dan sumbangan terhadap pelaksanaan pembangunan proyek-proyek berbagai sektor bagi negara-negara yang telah berkembang atau maju ekonominya, dimana pada gilirannya industri pariwisata merupakan suatu kenyataan ditengah-tengah industri lainnya.

Hal-hal yang berhubungan dengan pariwisata harus memenuhi syarat Sapta Pesona Pariwisata, yaitu :

1. Aman

Wisatawan akan senang berkunjung ke suatu tempat apabila merasa aman, tenteram, tidak takut, terlindungi dan bebas dari :

- a. Tindak kejahatan, kekerasan, ancaman, seperti kecopetan, pemerasan, penodongan, penipuan dan lain sebagainya.
- b. Terserang penyakit menular dan penyakit berbahaya lainnya
- c. Kecelakaan yang disebabkan oleh alat perlengkapan dan fasilitas yang kurang baik, seperti kendaraan, peralatan, untuk makan dan minum, lift, alat perlengkapan rekreasi atau olah raga.

- d. Gangguan oleh masyarakat, antara lain berupa pemaksaan oleh pedagang asongan tangan jail, ucapan dan tindakan serta perilaku yang tidak bersahabat dan lain sebagainya.

Jadi, aman berarti tejamin keselamatan jiwa dan fisik, termasuk milik (barang) wisatawan.

## 2. Tertib

Kondisi yang tertib merupakan sesuatu yang sangat didambakan oleh setiap orang termasuk wisatawan. Kondisi tersebut tercermin dari suasana yang teratur, rapi dan lancar serta menunjukkan disiplin yang tinggi dalam semua segi kehidupan masyarakat, misalnya :

- a. Lalu lintas tertib, teratur dan lancar, alat angkutan datang dan berangkat tepat pada waktunya.
- b. Tidak nampak orang yang berdesakan atau berebutan untuk mendapatkan atau membeli sesuatu yang diperlukan.
- c. Bangunan dan lingkungan ditata teratur dan rapi.
- d. Pelayanan dilakukan secara baik dan tepat.
- e. Informasi yang benar dan tidak membingungkan.

## 3. Bersih

Bersih merupakan suatu keadaan/kondisi lingkungan yang menampilkan suasana bebas dari kotoran, sampah, limbah, penyakit dan pencemaran. Wisatawan akan merasa betah dan nyaman bila berada di tempat-tempat yang bersih dan sehat seperti :

- a. Lingkungan yang bersih baik di rumah sendiri maupun di tempat-tempat umum, seperti di hotel, restoran, angkutan umum, tempat rekreasi, tempat buangair kecil/besar dan lain sebagainya. Bersih dari sampah, kotoran, corat-corek dan lain sebagainya.
- b. Sajian makanan dan minuman bersih dan sehat.
- c. Penggunaan dan penyajian alat perlengkapan yang bersih seperti sendok, piring, tempat tidur, alat olah raga dan lain sebagainya.
- d. Pakaian dan penampilan petugas bersih, rapi dan tidak mengeluarkan bau tidak sedap dan lain sebagainya.

#### 4. Sejuk

Lingkungan yang serba hijau, segar, rapi memberi suasana atau keadaan sejuk, nyaman dan tenteram. Kesejukan yang dikehendaki tidak saja harus berada di luar ruangan atau bangunan, akan tetapi juga di dalam ruangan, misalnya ruangan kerja/belajar, ruangan makan, ruangan tidur dan lain sebagainya. Untuk itu hendaklah kita semua :

- a. Turut serta aktif memelihara kelestarian lingkungan dan hasil penghijauan yang telah dilakukan masyarakat maupun pemerintah
- b. Berperan secara aktif untuk menganjurkan dan memelopori agar masyarakat setempat melaksanakan kegiatan penghijauan dan memelihara kebersihan, menanam berbagai tanaman di halaman rumah masing-masing baik untuk hiasan maupun tanaman yang bermanfaat bagi rumah tangga, melakukan penanaman pohon/ tanaman rindang di sepanjang jalan di lingkungan masing-masing di halaman sekolah dan lain sebagainya
- c. Membentuk perkumpulan yang tujuannya memelihara kelestarian lingkungan.
- d. Menghiasi ruang belajar/ kerja, ruang tamu, ruang tidur dan tempat lainnya dengan aneka tanaman penghias atau penyejuk.
- e. Memprakarsai berbagai kegiatan dan upaya lain yang dapat membuat lingkungan hidup kita menjadi sejuk, bersih, segar dan nyaman.

#### 5. Indah

Keadaan atau suasana yang menampilkan lingkungan yang menarik dan sedap dipandang disebut indah. Indah dapat dilihat dari berbagai segi, seperti dari segi tata warna, tata letak, tata ruang bentuk ataupun gaya dan gerak yang serasi dan selaras, sehingga memberi kesan yang enak dan cantik untuk dilihat.

Indah yang selalu sejalan dengan bersih dan tertib serta tidak terpisahkan dari lingkungan hidup baik berupa ciptaan Tuhan Yang Maha Esa maupun hasil karya manusia. Karena itu kita wajib memelihara lingkungan hidup agar lestari dan dapat dinikmati oleh umat manusia.

#### 6. Ramah tamah

Ramah tamah merupakan suatu sikap dan perilaku seseorang yang menunjukkan keakraban, sopan, suka membantu, suka tersenyum dan menarik

hati. Ramah tamah tidaklah berarti bahwa kita harus kehilangan kepribadian kita ataupun tidak tegas dalam menentukan sesuatu keputusan atau sikap. Ramah, merupakan watak dan budaya bangsa Indonesia pada umumnya, yang selalu menghormati tamunya dan dapat menjadi tuan rumah yang baik. Sikap ramah tamah ini merupakan satu daya tarik bagi wisatawan, oleh karena itu harus kita pelihara terus.

#### 7. Kenangan

Kenangan adalah kesan yang melekat dengan kuat pada ingatan dan perasaan seseorang yang disebabkan oleh pengalaman yang diperolehnya. Kenangan dapat berupa yang indah dan menyenangkan, akan tetapi dapat pula yang tidak menyenangkan. Kenangan yang ingin diwujudkan dalam ingatan dan perasaan wisatawan dari pengalaman berpariwisata di Indonesia, dengan sendirinya adalah yang indah dan menyenangkan. Kenangan yang indah ini dapat pula diciptakan dengan antara lain :

- a. Akomodasi yang nyaman, bersih dan sehat, pelayanan yang cepat, tepat dan ramah, suasana yang mencerminkan ciri khas daerah dalam bentuk dan gaya bangunan serta dekorasinya
- b. Atraksi seni budaya daerah yang khas dan mempesona baik itu berupa seni tari, seni suara dan berbagai macam upacara
- c. Makanan dan minuman khas daerah yang lezat, dengan penampilan dan penyajian yang menarik. Makanan dan minuman ini merupakan salah satu daya tarik yang kuat dan dapat dijadikan jati diri (identitas daerah).

Cenderamata yang mungil yang mencerminkan ciri-ciri khas daerah bermutu tinggi, mudah dibawa dan dengan harga yang terjangkau mempunyai arti tersendiri dan dijadikan bukti atau kenangan dari kunjungan seseorang ke suatu tempat/daerah/Negara.

(<http://mangkutak.wordpress.com/2009/01/05/dasar-pengertian-pariwisata/>)

## 2. Jenis Pariwisata

Jenis-jenis pariwisata seperti yang disebutkan oleh Tim pariwisata LPP – ITB dalam Jurnal PWK (1993: 73) antara lain:

1. *City Tourism* yaitu perjalanan dalam suatu kota untuk melihat atau mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar, serta perwujudan budaya yang ada di tempat tersebut.
2. *Culture Tourism* Yaitu perjalanan untuk meresapi suatu hidup yang telah hilang dari ingatan manusia.
3. *Marine Tourism* Yaitu kegiatan pariwisata yang ditunjang oleh sarana dan prasarana untuk berenang, memancing, menyelam, dan olahraga lainnya, termasuk sarana dan prasarana akomodasi, serta makan dan minum.
4. *Ethnic Tourism* yaitu perjalanan untuk mengamati perwujudan kebudayaan dan gaya hidup masyarakat yang dianggap menarik.
5. *Recreational Tourism* yaitu kegiatan wisata yang berkisar pada olahraga, menghilangkan ketegangan dan melakukan kontak sosial dalam suasana yang santai.
6. *Ecotourism* yaitu perjalanan ke suatu tempat yang relatif masih asli, belum tercemar, dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi, menikmati pemandangan, tumbuhan dan binatang liar, serta perwujudan budaya yang ada di tempat tersebut.
7. *Alternative Tourism* yang merupakan jenis pariwisata yang sengaja disusun dalam skala kecil, memperhatikan kelestarian lingkungan dan segi-segi sosial. Bentuk pariwisata ini sengaja diciptakan sebagai tandingan terhadap bentuk pariwisata yang berskala besar. Keuntungan dari pariwisata alternatif ini langsung dirasakan oleh masyarakat setempat sebagai pemilik dan penyelenggara jasa pelayanan dan fasilitas pariwisata, serta jenis pariwisata yang menarik yaitu pariwisata yang dihubungkan dengan kebudayaan, keindahan alam, perkembangan ekonomi, lancarnya akomodasi dan tersedianya infrastruktur penunjang.
8. *Agro Tourism = Rural Tourism = Farm Tourism* yaitu merupakan perjalanan untuk meresapi dan mempelajari kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan,

kehutan. Jenis pariwisata ini bertujuan untuk mengajak wisatawan untuk ikut melestarikan sumber daya alam dan kelestariannya.

9. *Urban Tourism* adalah bentuk pariwisata yang umum terjadi di kota-kota besar dimana pariwisata merupakan kegiatan yang cukup penting, namun bukan merupakan kegiatan yang utama di kota tersebut.
10. *Social Tourism* adalah suatu pendekatan untuk menyelenggarakan hiburan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah serta orang-orang yang tidak memiliki inisiatif untuk melakukan perjalanan serta orang-orang yang belum mengerti bagaimana cara mengatur suatu perjalanan wisata.

### 3. Bentuk Pariwisata

Menurut Soekardijo (1989: 18) perjalanan wisata dapat dibagi menjadi bentuk-bentuk wisata antara lain:

1. Wisata mancanegara yaitu wisatawan yang dalam perjalanannya memasuki daerah negara yang bukan negaranya.
2. Wisata domestik yaitu yaitu perjalanan wisata didalam wilayah negaranya sendiri.
3. Wisata reseptif (pasif) yaitu wisata yang dilihat dari segi ekonomi dari kedatangan wisatawan mancanegara.
4. Wisata aktif yaitu perjalanan wisata ke tempat wisata baik itu di dalam negeri maupun ke luar negeri.
5. Wisata kecil yaitu perjalanan wisata yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dan dilakukan selama beberapa hari atau jam.
6. Wisata besar yaitu perjalanan wisata yang dilakukan secara rombongan dan dilakukan sampai beberapa minggu atau bulan.

### 4. Wisatawan

Menurut UU RI No.9 Tahun 1990 dalam Yoeti (1997: 194) menyatakan bahwa wisatawan adalah orang yang melakukan kegiatan wisata. Sedangkan menurut Konferensi Roma Tahun 1963 dalam Hadinoto (1996: 14) menyatakan bahwa wisatawan adalah pengunjung sementara yang tinggal disuatu negara lebih

dari 24 jam dengan motivasi kunjungannya dapat digolongkan untuk liburan, bisnis, keluarga, seminar atau konferensi dan lain-lain.

Menurut UN, *Convention Concerning Customs Facilites For Touring* (1954) Wisatawan adalah setiap orang yang datang disebuah Negara karena alasan yang sah kecuali untuk berimigrasi dan yang tinggal setidaknya 24 Jam dan selama-lamanya 6 Bulan dalam tahun yang sama.

Dalam pengertian ini wisatawan dibedakan berdasarkan waktu dan tujuan yang disebut wisatawan adalah orang-orang yang berkunjung setidaknya 24 dan yang datang berdasarkan motivasi Mengisi waktu senggang seperti bersenang, berlibur, untuk kesehatan, studi, keperluan agama, dan olahraga, serta bisnis, keluarga, peurtusan, dan pertemuan-pertemuan.

Sedangkan ekskurionis adalah pengunjung yang hanya tinggal sehari di Negara yang dikunjungi tanpa bermalam. Pengertian ini paling banyak digunakan karena pembedanya tegas sehingga mudah dipahami antara pengunjung yang bisa disebut wisatawan, dan pengunjung yang hanya ekskurisionis saja.

#### **D. Perencanaan Pengembangan Pariwisata**

Perencanaan pengembangan pariwisata menurut Hardinoto (1996: 100) meliputi 5 (lima) maksud dasar, yaitu:

1. Identifikasi pendekatan alternative dari pemasaran, pengembangan, organisasi industri wisata, pelayanan pendukung dan aktivitas.
2. Penyesuaian terhadap yang tak tersangka, yaitu mengenai kondisi ekonomi umum, situasi *supplay/demand*, nilai-nilai dan pola hidup, keuntungan besar industri tertentu.
3. Mempertahankan keunukan, yaitu cirri khas alam dan sumber daya, kebudayaan local dan kehidupan tradisional, arsitektur local, monument sejarah, peristiwa dan aktivitas local, taman dan kawasan olahraga, dan sebagainya.
4. Mengkreasikan keinginan seperti meningkatkan kesadaran akan keuntungan wisata, menciptakan citra yang jelas dan positif dari kawasan tujuan wisata, organisasi industri wisata yang efektif, meningkatkan kerjasama dengan para

operator individual, program efektif pemasaran, isyarat dan informasi wisata, serta maksud-maksud lain.

5. Mencegah yang tidak diinginkan, seperti: pertentangan dan persaingan antar para operator, sikap bermusuhan dan tidak ramah dari penduduk local terhadap wisatawan, kerusakan atau perubahan permanen yang tidak diinginkan dari ciri khas alam dan sumber daya sejarah, kehilangan identitas budaya, pemberhentian peristiwa dari aktivitas lokal, kepadatan, kongesti dan masalah lalulintas, polusi udara, visual, kemusiman tinggi, dan faktor-faktor lain.

#### **E. Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata**

Salah satu bentuk perencanaan yang partisipatif dalam pembangunan pariwisata adalah *Community Based Tourism (CBT)* sebagai pendekatan pembangunan. Definisi CBT yaitu: 1) bentuk pariwisata yang memberikan kesempatan kepada masyarakat lokal untuk mengontrol dan terlibat dalam manajemen dan pembangunan pariwisata, 2) masyarakat yang tidak terlibat langsung dalam usaha-usaha pariwisata juga mendapat keuntungan, 3) menuntut pemberdayaan secara politis dan demokratisasi dan distribusi keuntungan kepada komunitas yang kurang beruntung di pedesaan.

Sepuluh prinsip dasar pembangunan pariwisata menurut Suansri (2003: 12) yaitu:

1. Mengakui, mendukung dan mengembangkan kepemilikan komunitas dalam industri pariwisata,
2. Mengikutsertakan anggota komunitas dalam memulai setiap aspek,
3. Mengembangkan kebanggaan komunitas,
4. Mengembangkan kualitas hidup komunitas,
5. Menjamin keberlanjutan lingkungan,
6. Mempertahankan keunikan karakter dan budaya di area lokal,
7. Membantu perkembangnya pembelajaran tentang pertukaran budaya pada komunitas,
8. Menghargai perbedaan budaya dan martabat manusia,
9. Mendistribusikan keuntungan secara adil pada anggota komunitas,

10. Berperan dalam menentukan prosentase pendapatan (pendistribusian pendapatan) dalam proyek yang ada di komunitas.

Sedangkan menurut Murphy (1985: 153) menekankan strategi yang terfokus pada identifikasi tujuan masyarakat tuan rumah dan keinginan serta kemampuan mereka menyerap manfaat pariwisata yaitu setiap masyarakat harus didorong untuk mengidentifikasi tujuannya sendiri dan mengarahkan pariwisata untuk meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal. Untuk itu dibutuhkan perencanaan sedemikian rupa sehingga aspek sosial dan lingkungan masuk dalam perencanaan dan industri pariwisata memperhatikan wisatawan dan jutga masyarakat setempat.

Menurut Murphy Ada tiga faktor yang mempengaruhi bentuk sikap masyarakat terhadap pariwisata:

- Hubungan penduduk dengan wisatawan
- Kepentingan industri terhadap kemakmuran individual dan masyarakat
- Toleransi masyarakat dalam menerima pembanguna pariwisata.

Keuntungan dari pendekatan perencanaan yang partisipatif menurut Drake an Paula dalam Garrod, (2001: 6) adalah:

1. Mengkonsultasikan proyek dengan masyarakat atau melibatkan masyarakat dalam manajemen penerapan proyek dan/atau pengoperasian proyek dapat meningkatkan efisiensi proyek,
2. Efektifitas proyek jauh lebih meningkat dengan mengikutsertakan masyarakat yang dapat membantu memastikan jika tujuan proyek bisa ditemukan dan keuntungan akan diterima kelompok/masyarakat lokal,
3. Sebagai capacity building bagi kelompok masyarakat agar mereka memahami apa itu ekowisata dan peranannya dalam pembangunan berkelanjutan.(terjamin bahwa yang terlibat sangat nampak keikutsertaannya secara aktif dalam proyek dengan pelatihan formal/informal serta kegiatan untuk meningkatkan keperdulian),
4. Pemberdayaan lokal meningkat dengan memberi masyarakat lokal kontrol yang lebih besar terhadap sumber daya dan memutuskan menggunakan sumber daya yang berpengaruh/penting sesuai dengan tempat tinggal mereka.(artinya

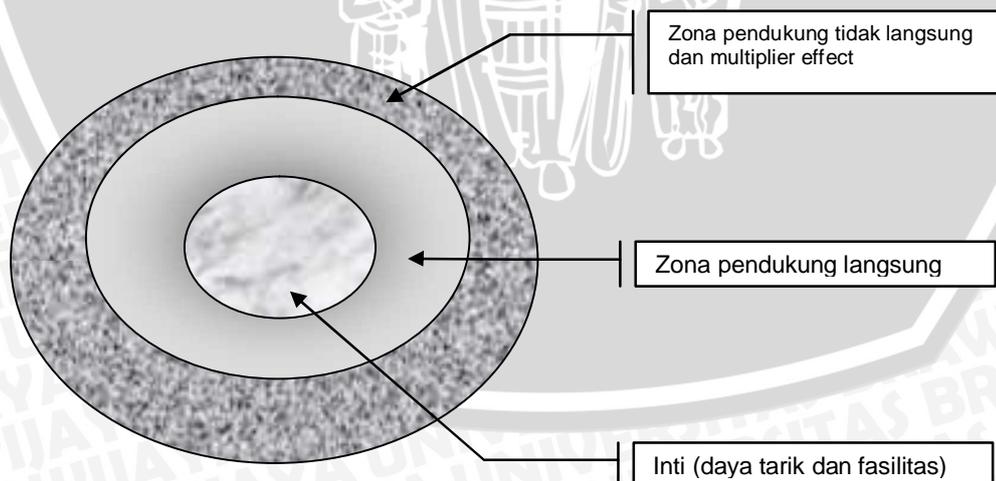
menjamin jika masyarakat lokal menerima keuntungan yang sesuai dengan penggunaan sumber daya),

5. Pembagian keuntungan dengan warisan lokal (local beneficiaries), misal biaya tenaga kerja, biaya keuangan, operasional dan perawatan proyek, monitoring dan evaluasi proyek.

Garrod (2001: 7) menyebutkan elemen-elemen dari perencanaan pariwisata partisipatif yaitu:

1. Membutuhkan kepemimpinan yang efektif (memiliki kredibilitas sebagai orang yang memahami, empati dan peduli dengan pendapat stakeholder, memiliki kredibilitas sebagai seseorang yang memiliki keahlian yang dibutuhkan di daerah tersebut, mandiri, memiliki kemampuan mengidentifikasi masalah yang nyata dan tidak nyata, memiliki kemampuan mengatur partisipan, bersedia mengem-bangkan kelompok), mampu mengarahkan keterlibatan yang sifatnya top down ke bottom up),
2. Pemberdayaan masyarakat lokal,
3. Mengkaitkan keuntungan ekonomi dengan konservasi,
4. Melibatkan stakeholder lokal dalam setiap tahapan proyek,
5. Adanya partisipasi lokal dalam monitoring dan evaluasi proyek.

#### Diagram Daerah Pariwisata (Model Smith)



Sumber: <http://hmpwk.brawijaya.ac.id/cuas/28092004a.doc>

- Inti, mengandung daya tarik dan fasilitas yang membuat suatu wilayah menjadi daerah tujuan wisatawan.

- Zona pendukung langsung, menempatkan penduduk lokal dan berbagai fungsi yang dibutuhkan masyarakat. Terdiri dari pertokoan, kantor-kantor pemerintahan dan rekreasi yang melayani penduduk ditambah jasa pendukung untuk industri pariwisata.
- Zona pendukung tidak langsung dari daerah pedalaman, dimana menyatukan daerah yang terkena dampak dan melibatkan investasi serta aktivitas yang berhubungan terhadap daerah setempat.

#### **F. Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo**

Sebagai komponen utama dalam *Community Based Tourism* (CBT), masyarakat mempunyai peran yang sangat penting dalam menunjang pembangunan pariwisata. Peran serta mereka dalam memelihara sumber daya alam dan budaya yang dimiliki merupakan andil yang besar dan berpotensi menjadi daya tarik wisata. Pembangunan pariwisata akan sulit terwujud ketika masyarakat setempat merasa diabaikan, hanya sebagai objek, serta merasa terancam oleh kegiatan pariwisata di daerah mereka.

Menurut Janianton Damanik dan Helmut F. Weber dalam Yoeti (2000: 106), terdapat beberapa langkah dasar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan pembangunan pariwisata serta bersedia untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut, antara lain dengan cara:

- 1) Pemahaman tentang peran masyarakat. Masyarakat harus melakukan pengawasan atas perkembangan proyek.
- 2) Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proyek dengan mengajak pemimpin lokal, asosiasi lokal, gagasan - gagasan dan harapan masyarakat setempat menjadi sentral dalam penyusunan rencana proyek.
- 3) Membentuk kelompok pemangku kepentingan lokal yang akan terlibat intensif dalam proyek. Masyarakat setempat memiliki tokoh kunci, petani progresif, pedagang / wiraswastawan yang berpikiran maju dan kelompok kekerabatan.

- 4) Memadukan manfaat keuntungan dengan kegiatan konservasi secara langsung. Baik peningkatan pendapatan maupun perluasan kesempatan kerja harus memberikan sumbangan yang signifikan pada konservasi.
- 5) Dipastikan bahwa keuntungan akan dinikmati oleh masyarakat setempat, baik secara perorangan maupun kolektif.
- 6) Pastikan bahwa pemimpin informal dan formal masyarakat, dengan memperhatikan aspek jender, terlibat di dalam perencanaan.
- 7) Ciptakan perubahan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui aktivitas ekonomi (organisasi masyarakat) yang lebih efektif menjadi media untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proyek pembangunan pariwisata.
- 8) Memahami setiap kawasan yang memiliki situasi yang berbeda - beda agar dapat dicapai kesepakatan bersama yang tidaklah mudah.
- 9) Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berlanjut.

Dengan memperhatikan prinsip-prinsip dan unsur-unsur yang harus dipenuhi dalam pembangunan pariwisata, maka kata kunci dari pembangunan pariwisata adalah bagaimana membangun partisipasi masyarakat. Salah satu cara yang dapat digunakan dalam membangun partisipasi masyarakat adalah menggunakan metode *Participatory Rural Appraisal (PRA)*. PRA adalah metode tentang pengkajian keadaan masyarakat desa secara partisipatif. Metode ini digunakan sebagai alat untuk pemahaman terhadap lokasi dengan cara belajar dari, untuk, dan bersama dengan masyarakat untuk mengetahui, menganalisa, dan mengevaluasi hambatan dan kesempatan melalui multidisiplin dan keahlian untuk menyusun informasi dan pengambilan keputusan sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi masyarakat dalam penataan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi dan informasi pada tahap penyusunan rencana penataan tapak kawasan maupun dokumen yang lain, akan tetapi lebih didorong untuk ikut aktif dalam pelaksanaan pembangunan kota tersebut. Selain itu motivasi yang dibangun dalam masyarakat harus terus terjaga, bahkan ditingkatkan untuk mewujudkan kehidupan kota yang serasi, seimbang, selaras dan berkelanjutan.

Didalam UUPR Mo. 24 tahun 1992 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh masyarakat, oleh karena itu diharapkan tercapainya penataan ruang baik, yaitu:

1. Terselenggaranya pemanfaatan ruang berwawasan lingkungan;
2. Terselenggaranya pengaturan pemanfaatan ruang kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. Tercapainya pemanfaatan yang luas.

Dari beberapa uraian diatas dapat dikatakan bahwa untuk memperoleh efektivitas dalam pelaksanaan pembangunan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel dibutuhkan peran serta masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya.



### BAB III

## METODE PENELITIAN

#### A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pada pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Tujuan penggunaan penelitian dengan metode deskriptif adalah berusaha untuk menggambarkan/mendeskripsikan, memaparkan berbagai fenomena sosial yang terjadi pada obyek penelitian secara sistematis, faktual untuk dianalisis dengan cermat dan mendalam. Analisis kualitatif dalam penelitian ini adalah menggunakan data-data non statistik dan terbatas pada usaha-usaha yang mengungkapkan permasalahan sebenarnya.

Sebagai landasan teori dalam memahami pendekatan kualitatif berdasarkan pendapat Bogdan & Taylor dalam Moleong (2005: 4) yang mengartikan dan memahami metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif menghendaki agar pengertian dan hasil interpretasi yang diperoleh dirundingkan dan disepakati oleh orang-orang yang dijadikan sebagai sumber data.

Penelitian ini menggambarkan tentang bagaimana keberlanjutan suatu perencanaan pembangunan yang melibatkan partisipasi masyarakat agar mencapai suatu keberhasilan dan keberlanjutan dalam pengelolaan pembangunannya. Sehingga tidak membahas mengenai tahapan pelaksanaan maupun evaluasi dari program pengembangan tapak kawasan wisata telaga ngebel di Kabupaten Ponorogo.

#### B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian berfungsi untuk memilih data yang relevan, meskipun suatu data menarik tetapi karena tidak relevan maka tidak perlu dimasukkan dalam data yang dikumpulkan. Moleong (2005: 4)

Sesuai dengan judul skripsi ini yaitu partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, maka fokus yang dijabarkan sebagai berikut:

1. partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan pada pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, ditinjau dari :
  - a. Penyusunan rencana
  - b. Penyusunan program rencana
  - c. Pelaksanaan Rencana
  - d. Pengawasan atas pelaksanaan rencana
  - e. Evaluasi
2. Faktor pendukung dan faktor Penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.

### **C. Lokasi dan Situs Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan dengan mengambil lokasi di Propinsi Jawa Timur, khususnya di Kabupaten Ponorogo, yang difokuskan di daerah Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel yang digunakan sebagai lokasi perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata.

Adapun alasan melakukan penelitian pada Pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo adalah :

1. Kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo merupakan kawasan wisata yang sangat berpotensi menjadi objek wisata tingkat nasional karena memiliki nuansa lingkungan yang masih alami dan asri.
2. Karena pengembangan pariwisata berwawasan lingkungan ini sangat penting bagi pelestarian lingkungan alam dan kelangsungan hidup masyarakat.

Sedangkan yang dimaksud situs penelitian disini adalah pada organisasi pengelola perencanaan pembangunan pariwisata yaitu Dinas pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.

#### **D. Sumber Data**

Dalam penelitian kualitatif menurut Lofland dan Lofland dalam Moleong (2004: 157), sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data kualitatif tersebut dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu :

##### **Data Primer**

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari sumbernya atau nara sumber melalui wawancara. Informasi sebagai sumber data dipilih secara purposive, hal ini didasarkan pada subyek yang menguasai permasalahan, yaitu orang-orang yang terlibat secara langsung dan terkait dengan proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pengembangan kawasan wisata, dan orang-orang yang mengetahui langsung serta terlibat dalam pembangunan kawasan wisata di Kabupaten Ponorogo yang meliputi Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo serta masyarakat yang berada disekitar lokasi pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.

##### **Data Sekunder**

Data sekunder yaitu data yang sudah diolah dalam bentuk naskah tertulis atau dokumen dan arsip-arsip di lapangan yang relevan dengan masalah dan fokus sehingga dapat dipakai sebagai pendukung dalam penelitian ini, seperti yang berhubungan dengan pengembangan kawasan wisata. Dalam hal ini data sekunder yang diperoleh adalah:

- a. Data Mengenai perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga ngebel Kabupaten Ponorogo.
- b. Renja dan Renstra Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.
- c. Data statistik jumlah penduduk Kecamatan Ngebel.
- d. Data statistik jumlah penduduk Kabupaten Ponorogo.

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Observasi (pengamatan langsung di lapangan)

Metode pengamatan (observasi) yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengamatan terlibat dimana peneliti melibatkan diri dalam kehidupan dari masyarakat yang diteliti untuk dapat melihat dan memahami gejala-gejala yang ada. Teknik observasi atau pengamatan langsung di lapangan yaitu di tempat dilaksanakannya pengembangan kawasan wisata dengan mengamati apa yang terjadi dan mengkaji data yang diperoleh melalui informan serta realitas yang terdapat di lapangan.

Wawancara secara mendalam (*depth interview*)

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang terbuka dan mengarah pada kedalaman informasi serta dilakukan secara semi terstruktur guna menggali pandangan subyek yang diteliti. Wawancara mendalam ini dapat dilakukan pada waktu dan konteks yang dianggap tepat guna mendapatkan data yang rinci, sejujurnya dan mendalam, dan dilakukan beberapa kali sesuai dengan keperluan peneliti yang berkaitan dengan kejelasan dan kemantapan masalah yang diteliti.

Dokumentasi

Penggunaan dokumen ditujukan untuk menunjang data hasil wawancara dan observasi, untuk kemudian dibandingkan dengan kenyataan di lapangan. Dokumentasi ini berupa foto-foto hasil kegiatan, dokumen berupa buku pedoman pelaksanaan kegiatan, dimaksudkan untuk melengkapi teknik wawancara dan observasi, yang ketiganya nanti saling melengkapi satu sama lain dalam artian data yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan data observasi serta hasil dokumentasi. Dalam hal ini yang dapat diwawancarai oleh peneliti, sebagai berikut:

- a. Bapak Suhardiman Darmawanto SH selaku Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata, Dinas Pariwisata dan Seni Budaya Kabupaten Ponorogo.
- b. Bapak Drs Sartomo Msi selaku Camat Ngebel.
- c. Bapak Drs Sutarto sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Kecamatan Ngebel.
- d. Bapak Ali, warga desa Ngebel.
- e. Bapak Sabar, warga desa Ngebel.
- f. Bapak Senu, warga desa Wagir Lor.
- g. Bapak Drs. Sukanto, warga sekitar telaga Ngebel.
- h. Ibu Siti, warga sekitar telaga Ngebel.

## F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam proses pengumpulan data:

1. Peneliti sendiri, yang merupakan sarana pengumpul data utama, terutama pada saat proses wawancara dan analisa data.
2. Pedoman wawancara, merupakan statu daftar pertanyaan yang akan diberikan kepada informan.
3. Perangkat penunjang lain yang merupakan buku catatan dan alat tulis yang digunakan untuk mencatat dat yang diperoleh dilokasi penelitian.

## G. Analisis Data

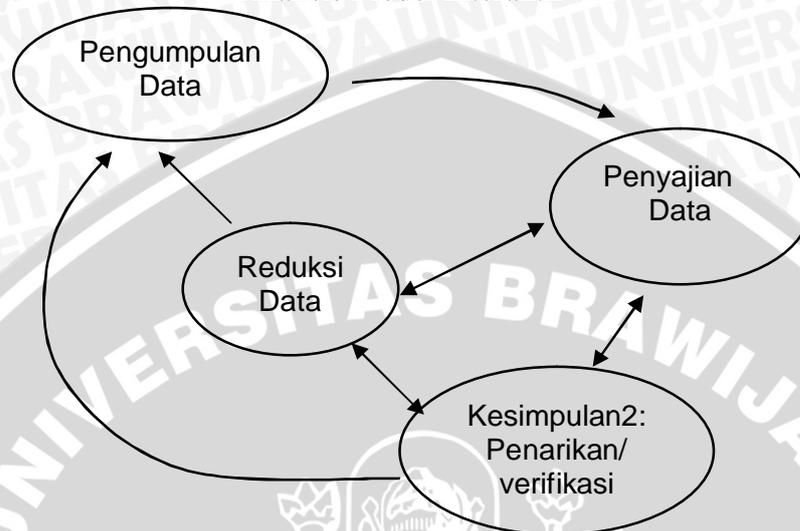
Setelah data dilapangan terkumpul, maka peneliti mengolah data dengan menggunakan teknik yang sesuai untuk mendapatkan pemecahan masalah yang diteliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai, yaitu mendapatkan gambaran tentang proses peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan serta dampak dan kendalanya dalam pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel.

Miles dan Huberman mempergunakan paparan data untuk menganalisis pekerjaan penelitian kualitatif. Mereka menyebut penyajian data (*data display*) sebagai seperangkat data dan informasi terorganisasi yang memungkinkan untuk menarik kesimpulan dan menentukan tindakan. Hal ini dianalogikan sebagai “anda adalah apa yang anda makan” sehingga dengan kata lain “anda mengetahui apa yang anda sajikan” menurut Miles dan Huberman (1992: 77).

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan analisis model interaktif. Model ini bergerak pada tiga komponen yaitu: reduksi data, sajian data dan kesimpulan, kemudian dianalisa dalam bentuk interaktif pada ketiga komponen tersebut.

Sistem kerja teknik analisa model interaktif ini sebagaimana dapat dilihat pada gambar 1 sebagai berikut:

Gambar 1  
Analisis Model Interaktif



Sumber : Miles dan Huberman, (1992)

#### 1. Reduksi Data

Data yang diperoleh di lokasi penelitian (data lapangan) dituangkan dalam uraian atau laporan yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan akan direduksi, dirangkum, dipilih hal – hal yang pokok, difokuskan pada hal – hal yang penting kemudian dicari tema atau polanya. Reduksi data berlangsung secara terus – menerus selama proses penelitian berlangsung. Selama pengumpulan data berlangsung diadakan tahap reduksi data selanjutnya dengan jalan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus – gugus dan menulis catatan.

#### 2. Penyajian Data

Penyajian/display data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran keseluruhan/bagian-bagian tertentu dari penelitian.

#### 3. Menarik Kesimpulan dan Verifikasi

Verifikasi dilakukan secara terus – menerus sepanjang proses penelitian berlangsung yaitu sejak awal memasuki lokasi penelitian dan selama proses pengumpulan data. Peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan yaitu mencari pola, tema,

hubungan persamaan, hal – hal yang timbul, hipotesis dan sebagainya yang dituangkan dalam kesimpulan yang masih tentative, tetapi dengan bertambahnya data akan diperoleh kesimpulan yang bersifat “grounded”

## H. Keabsahan Data

Agar data hasil penelitian ini benar-benar dapat dipertanggung jawabkan, maka diperlukan pengecekan keabsahan temuan atau keabsahan data. Derajat kepercayaan atau kebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standart apa yang digunakan, yang disebut keabsahan data. Sugiyono (2007: 120), mengemukakan bahwa ada empat kriteria yang digunakan untuk memeriksa keabsahan data yaitu:

- 1) Kreadibilitas, merupakan kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif antara lain dilakukan dengan:
  - a. Memperpanjang Keikutsertaan  
Keikutsertaan peneliti sangat menentukan dalam pengumpulan data. Perpanjangan keikutsertaan peneliti akan memungkinkan peningkatan derajat kepercayaan data yang dikumpulkan, sedangkan penelitian ini memakan waktu kurang lebih satu bulan.
  - b. Melakukan Pengamatan Secara Intensif  
Ketekunan pengamatan dimaksudkan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci, dalam hal ini peneliti melakukan pemeriksaan data lebih intensif lagi.
  - c. Melakukan *Peer Bebriefing*  
Teknik ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan berbagai masukan baik berupa kritik dan saran dari peneliti yang lain yang diperoleh melalui diskusi.
  - d. Triangulasi  
Teknik triangulasi dalam pengujian kreadibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan

berbagai waktu (Sugiyono 2007, h. 125). Dengan demikian penelitian ini terdapat triangulasi sumber, pengumpulan data, dan waktu.

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan dengan membandingkan hasil data yang diperoleh dengan peneliti yang lain yang juga sama meneliti di instansi tersebut.

#### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik untuk menguji kreadibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

#### 3. Triangulasi Waktu

Data yang dikumpulkan peneliti diambil diwaktu pagi hari, dimana pagi hari peneliti bisa menyaksikan langsung kegiatan dan dapat melakukan wawancara secara langsung berkenaan dengan kegiatan pelayanan publik.

#### e. Analisis Kasus Negatif

Dalam penelitian ini, penulis selaku peneliti belum menemukan kasus-kasus negatif yang bertentangan dengan data selama penelitian berlangsung.

#### f. Mengadakan Member Check

Dalam hal ini peneliti melakukan pengecekan data kepada pemberi data supaya data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data.

#### 2) Transferability

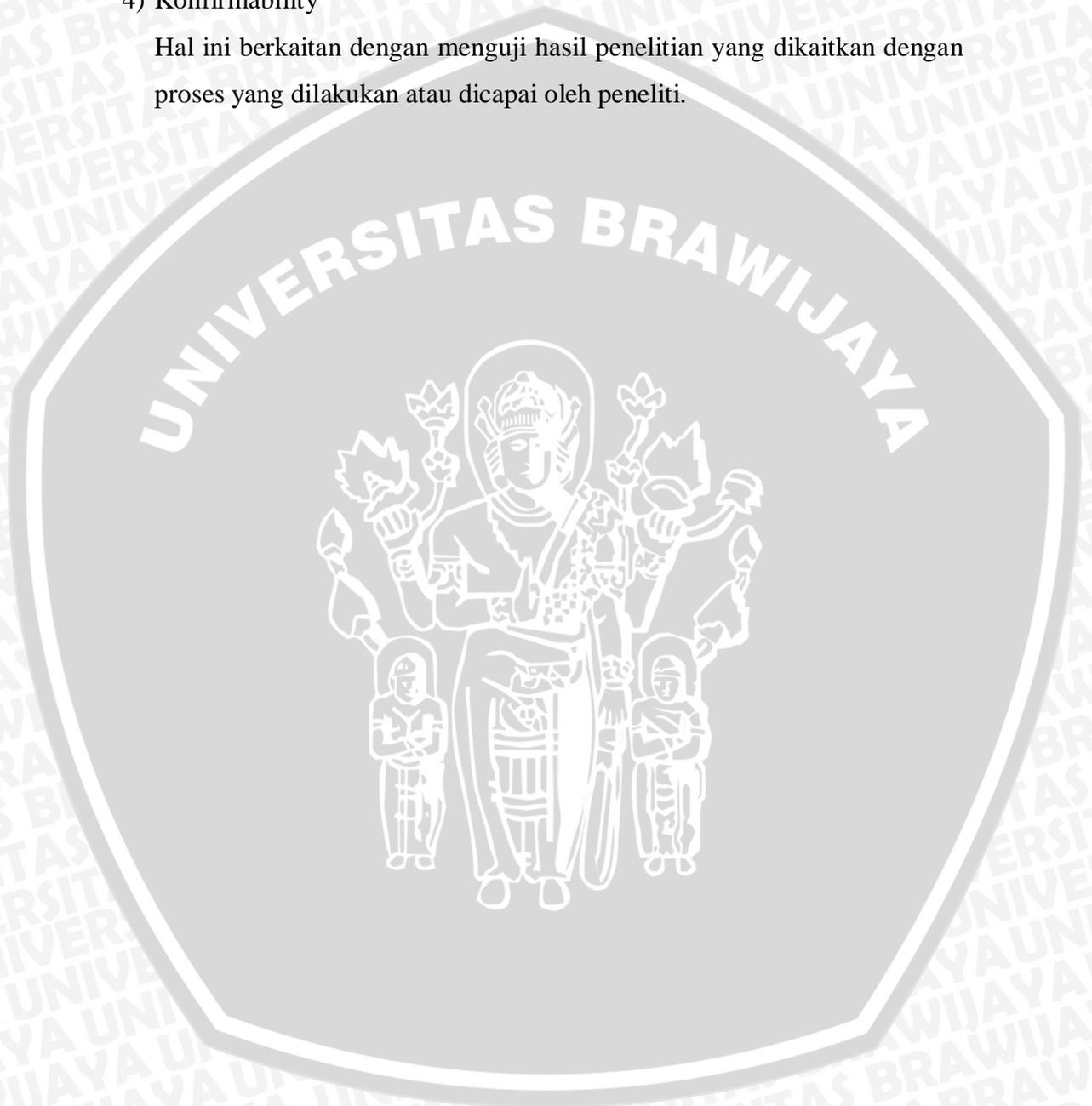
Hasil penelitian ini dapat dilakukan transferability agar pembaca dapat memahami hasil penelitian ini sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian ini, maka peneliti memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya.

### 3) Depenability

Aktivitas peneliti dalam hal ini berjalan karena juga telah diaudit oleh para pembimbing, mulai dari menentukan masalah, menentukan sumber data, melakukan analisis data dan sampai membuat kesimpulan.

### 4) Konfirmability

Hal ini berkaitan dengan menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang dilakukan atau dicapai oleh peneliti.



## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### A. Penyajian Data

#### 1. Data Umum

##### 1.1. Gambaran Umum Kabupaten Ponorogo

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km<sup>2</sup> yang terletak antara 111° 17' - 111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' - 8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter diatas permukaan laut, Ibukota kabupaten Ponorogo terletak 27 km sebelah selatan Kota Madiun, dan berada di jalur Madiun-Pacitan. Adapun jarak Ibu Kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 Km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara ( Jakarta ) kurang lebih 800 Km ke arah Barat.

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 21 kecamatan dan 303 kelurahan/desa. Kecamatan yang berada di wilayah Kabupaten Ponorogo tersebut adalah Kecamatan Ngrayun, Kecamatan Slahung, Kecamatan Bungkal, Kecamatan Sambit, Kecamatan Sawoo, Kecamatan Sooko, Kecamatan Pudak, Kecamatan Pulung, Kecamatan Mlarak, Kecamatan Siman, Kecamatan Jetis, Kecamatan Balong, Kecamatan Kauman, Kecamatan Jambon, Kecamatan Badegan, Kecamatan Sampung, Kecamatan Sukorejo, Kecamatan Ponorogo, Kecamatan Babadan, Kecamatan Jenangan, dan Kecamatan Ngebel. Jumlah penduduk di Kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2008 sebanyak 919.392 jiwa, yang terbagi penduduk laki-laki sebanyak 451.770 jiwa (49,14%) dan penduduk perempuan sebanyak 467.622 jiwa (50,86%), dengan jumlah rumah tangga sebanyak 231.498 rumah tangga dan tingkat kepadatan penduduknya sebesar 670 jiwa per km<sup>2</sup>

Tabel 1

**Batas Wilayah Administrasi Kabupaten Ponorogo**

No.	Berbatasan	Wilayah
1.	Utara / North	Kab.Magetan, Kab.Madiun, Kab.Nganjuk
2.	Timur / East	Kab.Tulungagung dan Kab.Trenggalek
3.	Selatan / South	Kab.Pacitan
4.	Barat / West	Kab.Pacitan dan Kab.Wonogiri (Prop.Jawa Tengah)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jika dilihat dari batas - batas administrasi pemerintahan kabupaten Ponorogo adalah sebelah Utara berbatasan langsung dengan kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk, sebelah Timur kabupaten Tulungagung dan Trenggalek, sebelah Selatan kabupaten Pacitan serta sebelah Barat kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).

Tabel 2

**Letak Ketinggian Dari Permukaan Laut/Altitudes**

Ketinggian	Wilayah
< 500 m	Meliputi 241 Desa
500 - 700 m.	Meliputi 44 Desa
> 500 m	Meliputi 18 Desa

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Tabel 3

**Keadaan Geografis (Dengan Suhu Berkisar Antara / Temperature)**

Letak	Suhu
Didataran Tinggi / Upland plain	18 s/d 26 Derajat Celcius
Didataran Rendah / Lowland plain	27 s/d 31 Derajat Celcius

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo di bagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, Sooko dan Pulung serta Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.

Ponorogo merupakan salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Timur, yang mempunyai luas lahan sawah 34.867 ha, sawah tadah hujan 1.856 ha,

sedangkan lahan kering seluas 102.311 ha digunakan untuk Pekarangan dan Bangunan 21.654 ha; Tegal/Ladang 30.203 ha; Hutan Negara 46.940 ha; Hutan Rakyat 108 ha; Perkebunan 200 ha dan lainnya 3.206 ha. Sebagian besar dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah, sedangkan sisanya digunakan untuk tegal, pekarangan dan lainnya.. <http://jatim.litbang.deptan.go.id/>

## 1.2. Gambaran Umum Pariwisata Kabupaten Ponorogo

Secara umum pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataan Kabupaten Ponorogo menunjukkan kinerja yang baik, peningkatan jumlah obyek dan daya tarik wisata dan fasilitasnya yang memadai, peningkatan jumlah pengusaha pariwisata, peningkatan jumlah pengunjung atau wisatawan dan peningkatan pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata merupakan bukti nyata kinerja Pemerintah Kabupaten Ponorogo dalam pembangunan dan pengembangan bidang kepariwisataannya. Keberhasilan ini didukung karena besarnya potensi alam dan budaya yang dapat dijadikan modal bagi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan Ponorogo.

Terdapat 4 (empat) potensi pembangunan dan pengembangan kepariwisataan yang ada di Kabupaten Ponorogo yaitu:

### 1. Potensi Wisata Alam

Terdapat beberapa wisata alam yang potensial untuk dikembangkan di Kabupaten Ponorogo.

- a. Wisata Alam Telaga Ngebel
- b. Wisata Alam Ngembag
- c. Wisata Alam Kucur
- d. Wisata Alam Beji Bungkal
- e. Wisata Alam Goa
- f. Wisata Alam Sumber Air Panas
- g. Wisata Alam Gunung Khayangan
- h. Wisata Alam Gunung Wilis
- i. Wisata Alam Gunung Pringgitan

### 2. Potensi Wisata Buatan

### 3. Potensi Wisata Budaya

#### 4. Potensi Wisata Religius

Kepariwisataan Kabupaten Ponorogo mempunyai ciri khusus, yaitu sosio religius, yang mengandung kemampuan untuk membentuk, mengembangkan, dan meningkatkan nilai budaya masyarakat, manusia yang mengacu pada kegiatan keagamaan dan budaya tradisional daerah, disamping itu ditinjau dari sudut ekonomi mempunyai pengaruh, yakni menambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan pekerjaan, ditinjau dari segi politik pertahanan dan keamanan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, menampilkan kepribadian berdasarkan jiwa semangat serta nilai luhur bangsa Indonesia, khususnya masyarakat Ponorogo.

Dengan memperhatikan ciri tersebut maka kondisi yang diinginkan pembangunan pariwisata Kabupaten Ponorogo adalah:

1. Pembangunan kepariwisataan diarahkan pada peningkatan pariwisata sebagai sektor andalan yang mampu menggalakkan kegiatan ekonomi termasuk, kegiatan disektor pertanian, industri kecil dan kerajinan serta jasa-jasa, lapangan kerja, hingga pendapatan masyarakat dan daerah dapat meningkat. Upaya pengembangan dan pendayagunaan potensi kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan daya tarik bagi wisatawan, baik wisatawan nusantara maupun mancanegara.
2. Dalam pembangunan kepariwisataan harus dijaga tetap terpeliharanya kepribadian bangsa serta kelestarian fungsi serta mutu lingkungan hidup. Kepariwisataan perlu ditata secara menyeluruh dan terpadu melibatkan sektor-sektor lain yang terkait.
3. Pariwisata Nusantara dikembangkan dengan cara memupuk rasa tanggung jawab dan cinta kepada tanah air dan bangsa serta memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan nasional terutama dalam bentuk penggalakan pariwisata remaja dengan lebih konsepsional dan lebih mendidik.
4. Upaya pengembangan obyek daya tarik wisata perlu ditingkatkan begitu pula pengenalan obyek dan daya tarik obyek wisata, kepada wisatawan melalui kegiatan promosi dan pemasaran yang profesional.
5. Pendidikan dan pelatihan kepariwisataan perlu makin ditingkatkan disertai dengan penyediaan sarana dan prasarana yang makin baik. Dengan

demikian mutu dan kelancaran pelayanan serta kenyamanan wisata dalam penyelenggaraan pariwisata dapat terjamin.

6. Sadar wisata berdasarkan sapta pesona perlu makin ditingkatkan melalui penyuluhan pembinaan pada kelompok-kelompok seni budaya, industri kerajinan, meningkatkan kualitas budaya dengan tetap menjaga nilai-nilai agama, citra kebudayaan, harkat dan martabat bangsa dan mencegah hal-hal yang dapat merugikan masyarakat dan kelestarian kehidupan budaya bangsa serta kerusakan ekosistem alam penyangga kehidupan.
7. Dalam pengembangan dan daya tarik wisata serta kegiatan pemasaran promosi baik dalam maupun diluar negeri dengan cara meningkatkan dan memperluas aksesibilitas.

Kondisi pariwisata yang diinginkan tersebut diatas dijabarkan dalam proyeksi masa depan sebagai berikut:

1. Kegiatan perencanaan pengembangan kepariwisataan yang terkoordinasi dengan sektor-sektor lain yang mendukung, seperti misalnya transportasi, air bersih, sarana komunikasi, listrik, industri cendera mata, telekomunikasi dan akomodasi.
2. Pengembangan obyek dan daya tarik wisata dipadukan dengan pengembangan usaha jasa dan sarana pariwisata seperti biro perjalanan, jasa konvensi, penyediaan akomodasi dan penyedia transportasi wisata.
3. Upaya pengembangan obyek dan daya tarik wisata perlu ditingkatkan, begitu pula upaya pengenalan obyek dan daya tarik wisata kepada wisatawan melalui kegiatan promosi dan kegiatan pemasaran yang profesional, baik didalam maupun di luar negeri, terus ditingkatkan secara terencana, terpadu dan efektif.
4. Pengembangan pariwisata dilaksanakan dengan memupuk rasa cinta tanah air dan bangsa dalam rangka memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa, nasional dalam bentuk penggalakkan pariwisata remaja dan lebih meningkatkan kepariwisataannya.
5. Untuk meningkatkan sumber daya manusia kepariwisataan kebijakan yang ditempuh ialah meningkatkan pendidikan dan pelatihan tingkat dasar dan menengah untuk penyelia dan manajemen. Meningkatkan pengetahuan dan

- ketrampilan para pembina, perajin dan pengelola usaha industri cendera mata dalam bidang desain.
6. Dalam usaha untuk meningkatkan peran serta koperasi swasta baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Mengembangkan keterkaitan berbagai usaha pariwisata dengan usaha sektor yang lain agar kegiatan ekonomi masyarakat dapat lebih meningkat lagi.
  7. Pemasaran pariwisata perlu dikembangkan secara profesional terutama melalui media masa, media cetak, audio visual dan pameran baik didalam maupun diluar negeri.
  8. Penyusunan sistem informasi yang tepat dan memuat berbagai indikator perkembangan kepariwisataan yang penting.

### **1.3. Gambaran Umum Kecamatan Ngebel**

Kecamatan Ngebel secara administratif terbagi menjadi 8 Desa dengan luas wilayah 5.951,1 ha, topografi berbukit dengan ketinggian 724 m dpl. Sesuai dengan rencana umum tata ruang kota tahun 1994/1995 – 2013/2014 Ibu Kota Kecamatan Ngebel meliputi wilayah seluas 608,75 ha yang mencakup sebagian 4 desa yaitu: Desa Ngebel, Desa Sahang, Desa Wagir Lor, dan Desa Gondowido. Sebagian besar wilayah kecamatan Ngebel terletak pada lahan terjal, kemiringan lahan berkisar 15 – 45 % dan terdapat perbedaan ketinggian yang cukup menyolok. Dengan kemiringan yang cukup tinggi mempunyai potensi tinggi untuk terjadi erosi sehingga perlu penataan yang baik dalam pengusahaannya. Kondisi ini sangat cocok untuk komoditas tahunan sehingga tidak terjadi pengolahan tanah secara intensif. <http://jatim.litbang.deptan.go.id/>

**Tabel 4**  
**Jumlah Penduduk Kecamatan Ngebel per Desa**

No.	Nama Desa	Jumlah Penduduk
1.	Ngrogung	3.341 Jiwa
2.	Sahang	1.776 Jiwa
3.	Wagir Lor	4.594 Jiwa
4.	Talun	4.311 Jiwa
5.	Gondowido	2.626 Jiwa
6.	Pupus	1.819 Jiwa
7.	Ngebel	3.743 Jiwa
8.	Sempu	1.836 Jiwa
<b>Total</b>		<b>24.040 Jiwa</b>

*Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo*

Kecamatan Ngebel sampai dengan akhir tahun 2008 mempunyai jumlah penduduk 24.040 jiwa dengan mata pencaharian sebagian besar sebagai petani pengusaha dan buruh tani. Luas lahan sawah 270,5 ha dan luas lahan kering 5.680,6 ha. Perincian menurut penggunaannya adalah pekarangan/Bangunan 1.225 ha; Tegal/Ladang 1.417 ha; Hutan Negara 2.833 ha; Hutan Rakyat 50 ha; Lainnya 155,6 ha. Banyaknya jumlah petani pengusaha mencerminkan bahwa Desa gebel termasuk desa yang tidak miskin, dan dengan jumlah buruh tani hanya 1/8 dari jumlah petani pengusaha kemungkinan tidak terdapat masalah yang serius pada lapangan pekerjaan. <http://jatim.litbang.deptan.go.id/>

#### 1.4. Wisata Telaga Ngebel

Kawasan Telaga Ngebel yang terletak di lereng Gunung Sumping (anak Gunung Wilis) ini masuk wilayah Desa Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo. Jarak tempuhnya sekitar 25 kilometer dari Kota Madiun dan 15 kilometer jika ditempuh dari Kota Ponorogo.

Merupakan obyek wisata alam potensial. Luas kawasan yang meliputi seluruh Desa di Kec.Ngebel adalah 59,50 Km<sup>2</sup>. Telaga Ngebel dikelilingi panorama alam yang indah berupa hutan lindung dan berbagai kehidupan flora dan fauna .Telaga Ngebel berada pada ketinggian 734 m dpl.mejadikan udara

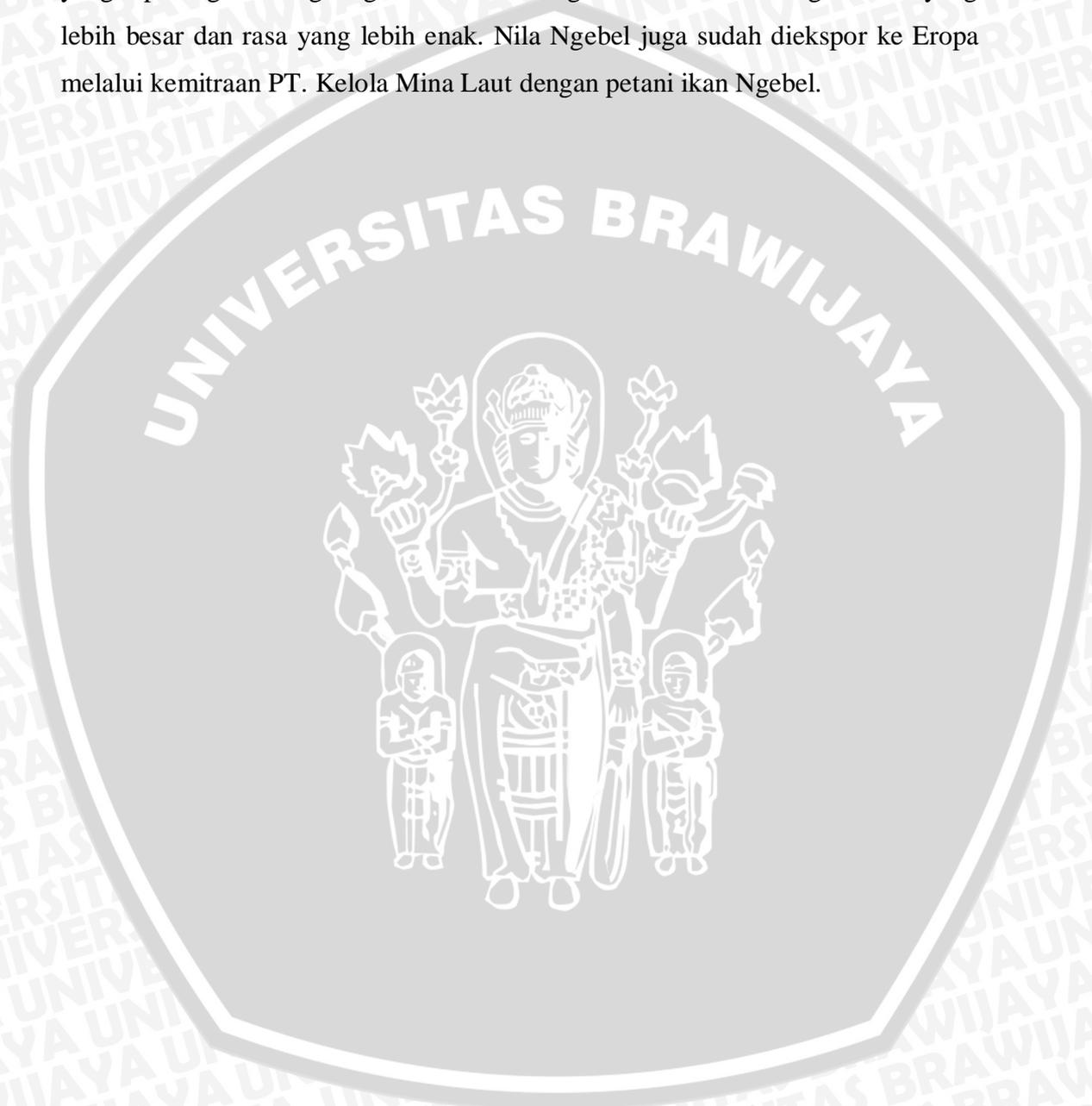
sejuk dengan jalan keliling telaga sepanjang 5 km.,yang bisa ditempuh dengan kendaraan roda 4 ( empat ) Sebagian atau luapan air telaga dimanfaatkan utamanya untuk kepentingan irigasi pertanian dan sebagian juga dipergunakan untuk pembangkit tenaga listrik .Obyek wisata telaga ngebel menjadi satu andalan pengembangan pariwisata alam di Kab.Ponorogo , oleh karena itu setiap tahun selalu diupayakan perkembangannya.

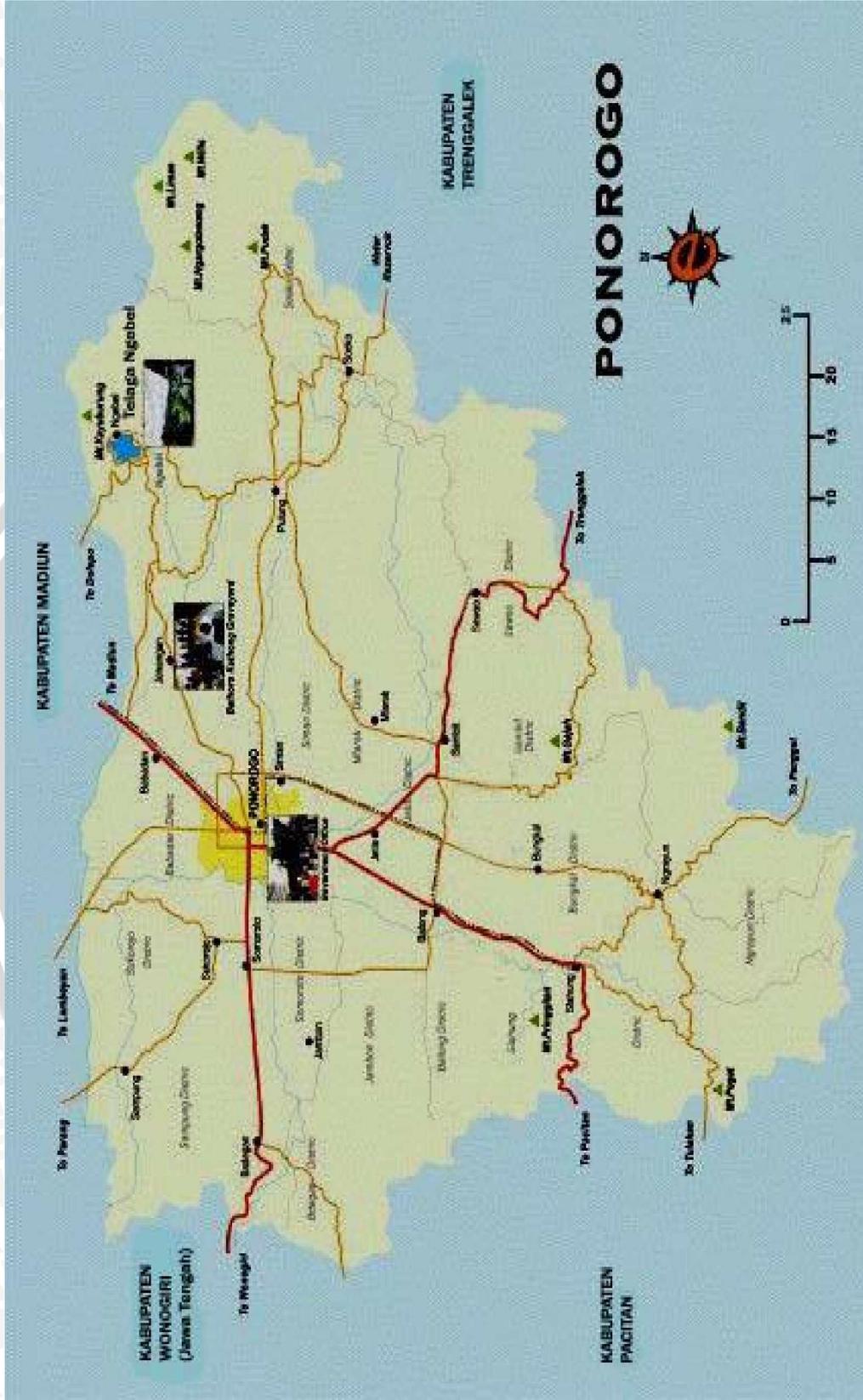
Kawasan Telaga Ngebel di Ponorogo berpotensi menjadi objek wisata tingkat nasional karena memiliki nuansa lingkungan yang masih alami dan asri. Sayangnya, kelengkapan sarana dan prasarana pendukung wisata masih belum memadai misalnya minimnya penginapan, jaringan listrik, dan hiburan rutin bagi pengunjung.objek wisata alamiah yang luasnya sekitar 60 hektar ini hanya memiliki tiga buah penginapan saja, yakni Hotel Mliwis Indah, Hotel Songgolangit, dan Hotel Tlogorejo.Di sekeliling telaga juga belum banyak dilengkapi dengan fasilitas tiang penerangan listrik jalan, sehingga sebagian besar titik telaga tidak jelas terlihat pada malam hari. Sampah plastik juga masih ditemui di sebagian kecil air tepian telaga.

Dari aspek infrastruktur jalan, di sepanjang jalan menuju telaga masih ada jalan-jalan yang berlubang. Sedangkan jalan di sekitar telaga belum dilengkapi dengan pagar pengaman antara jalan dengan telaga, sehingga membahayakan pengguna jalan.tarif penginapan di kawasan ini tergolong terjangkau bagi khalayak, yakni Rp 60.000 jika bermalam dan Rp 50.000 jika tidak bermalam. angka wisatawan menginap di Ngebel masih belum begitu banyak.

Di hari biasa, angka kunjungan penginapan sekitar tiga tamu per hari. Kalau hari raya khusus, khususnya Idul Fitri dan momen Grebeg Suro, penginapan penuh. Saat ini, hanya ada tiga penginapan di kawasanl Telaga Ngebel selalu dipakai menjadi tempat kegiatan ritual budaya setiap bulan Suro, yakni Grebeg Suro. Warsimin yang juga salah satu penggagas ritual Grebeg Suro ritual ini tidak kalah dengan ritual budaya lainnya di Indonesia karena mampu menyedot puluhan ribu warga masyarakat.Bentuknya, larungan sesaji dan risalah doa di Telaga Ngebel. Sayangnya, kegiatan ini belum dikemas dengan baik oleh pemerintah. Padahal jika digarap promosinya secara serius, Ngebel pasti banyak didatangi wisatawan.

Kawasan Telaga Ngebel juga memiliki wisata kuliner masakan ikan nila bakar maupun goreng. Di sepanjang kawasan telaga, terdapat sekitar 34 warung makan yang menyajikan menu nila bakar dan nila goreng. Nila-nila ini merupakan ikan khas yang dipelihara petani ikan dengan menggunakan karamba-karamba yang dipasang di Telaga Ngebel. Ikan nila Ngebel terkenal dari segi ukuran yang lebih besar dan rasa yang lebih enak. Nila Ngebel juga sudah diekspor ke Eropa melalui kemitraan PT. Kelola Mina Laut dengan petani ikan Ngebel.





Gambar 1 Peta Lokasi Kawasan Wisata Telaga Ngabel, Kecamatan Ngabel, Kabupaten Ponorogo

## B. Data Fokus Penelitian

### 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

#### 1.1. Tahap Penyusunan Rencana

Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, merupakan upaya dari pemerintah kabupaten Ponorogo untuk mengembangkan potensi wisata Telaga Ngebel yang khas/khusus untuk ditonjolkan dan dipromosikan, serta menunjukkan nilai-nilai potensial kawasan sehingga dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya. Selain itu upaya ini dapat digunakan untuk mendorong perkembangan wisata yang merupakan aspirasi dari masyarakat yang menghendaki adanya usaha serius dari pemerintah dan pihak swasta untuk pengembangan potensi wisata. Sehingga secara langsung atau tidak langsung pengembangan pariwisata ini akan memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar dengan munculnya usaha *multiplier effect*. Selain itu juga bisa digunakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor lain, yaitu membuka kesempatan kerja/ lapangan usaha baru bagi warga sekitar obyek wisata dan warga Kabupaten Ponorogo secara umum, untuk memasarkan hasil industri rumah tangga dan kerajinan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Seperti yang di sampaikan oleh Kepala Seksi Obyek Daya Tarik Wisata, Suhardiman Darmawanto SH yang ditemui di ruang kerjanya mengatakan bahwa:

“.....Proyek pengembangan kawasan wisata ini adalah untuk memberikan pada masyarakat secara umum dan pemerintah secara khusus kondisi eksisting terkait dengan potensi dan permasalahan kawasan terhadap rencana pengembangan tapak kawasan Wisata Telaga Ngebel. Oleh karenanya dalam penyusunan rencana kita memakai istilah 'pengembangan', dikarenakan kegiatan ini adalah memanfaatkan potensi yang ada yang selanjutnya dikembangkan menjadi suatu kawasan wisata yang bertaraf nasional yang berwawasan lingkungan dengan aktivitas melihat, menyaksikan, mempelajari, mengagumi alam, flora dan fauna, sosial - budaya etnis setempat,.....”

Sedangkan lokasi perencanaan kawasan wisata Telaga Ngebel adalah kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, yang secara umum merupakan kawasan wisata dan kawasan lindung serta kawasan budidaya terbatas. Telaga Ngebel sendiri berbatasan langsung dengan wilayah-wilayah desa Ngebel, Wagirlor, Ngrogung, dan Sahang.

Identifikasi terhadap tapak pada prinsipnya meliputi tiga unsur yang saling berkaitan erat yaitu unsur ekonomi, sosial-budaya dan fisik. Aspek fisik dalam hal ini juga mencakup Sumber Daya Alam yang ada didalam tapak kawasan.

Lingkungan alam merupakan salah satu sumber daya yang perlu dijaga dan dilestarikan. Hal ini bisa menjadi sebuah masukan dalam perencanaan, karena mengingat kondisi alam yang masih sangat asri di kawasan Ngebel juga difungsikan sebagai kawasan lindung. Pola hubungan antara manusia dengan alam perlu diakomodasikan agar terbentuk suatu pola hubungan yang saling menguntungkan dan tidak saling merusak satu dengan lainnya. Konsep alam yang ramah lingkungan.

Konsep pemerintah mengenai perencanaan Tapak Kawasan Wisata Ngebel adalah:

1. Konsep pola struktur tata ruang kawasan wisata terhadap struktur tata ruang yang sudah ada.
2. Konsep pemusatan kegiatan pada kawasan wisata dengan memperhatikan potensi dan daya dukung lahan yang ada.
3. Konsep *linkage System* kawasan yang menjadi pusat kegiatan dari kawasan sekelilingnya, sehingga dimungkinkan munculnya usaha *multiplier effect*.
4. Konsep pola sirkulasi dan penataan fasilitas / atraksi wisata.

Dalam penyusunan rencana pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini pemerintah juga melibatkan masyarakat sekitar untuk membicarakan perencanaan tersebut. karena peran serta masyarakat tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan penyampaian aspirasi dan informasi saja, tetapi juga ikut berperan aktif dalam pelaksanaan pengembangan tersebut. Seperti yang disampaikan oleh Camat Ngebel bapak Drs Sartomo MSi di ruang kerjanya pada tanggal 19 juni 2009

“.....Pada awal perencanaan, dinas – dinas terkait dan para tokoh masyarakat di undang untuk musyawarah membicarakan tentang rencana pengembangan tapak di telaga ngebel ini. Karena proyek pengembangan ini merupakan proyek yang besar dan membutuhkan banyak dukungan terutama dari masyarakat sekitar. Karena selain membutuhkan tenaga, juga kerelaan masyarakat untuk merelakan sebagian tanahnya terkait dengan pengembangan kawasan ini.....”

Hal senada juga dikatakan Oleh Bapak Drs Sutarto sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Kecamatan Ngebel:

“....Sebelumnya masyarakat sudah di ajak bermusyawarah dan telah diberi penyuluhan oleh kepala desa agar masyarakat bisa memahami hal ini. Karena kebanyakan masyarakat di sekitar sini mempunyai SDM yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan mengenai perencanaan pengembangan ini. Sehingga perlu sosialisasi meskipun itu perlu waktu yang tidak cepat. Tapi sekarang masyarakat sudah paham dan siap mendukung proyek pengembangan telaga Ngebel ini...”

Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara dalam beberapa tahapan. Tahap pertama adalah tahap pengumuman atau pemberitahuan kepada masyarakat. Tahap berikutnya adalah penyampaian aspirasi masyarakat dan tahapan akhir adalah tahap pengelolaan dan perumusan rencana berdasarkan aspirasi masyarakat. Teknik atau tata cara yang dilakukan dalam sosialisasi adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi langsung kepada masyarakat dengan presentasi di balai desa atau kecamatan.
2. Sosialisasi melalui media massa seperti koran, radio, atau televisi.
3. Sosialisasi melalui penyebaran pamflet atau selebaran yang dapat dipasang di tempat-tempat yang ramai dan sering didatangi masyarakat seperti di perkantoran, wartel, pasar, terminal, puskesmas, atau sekolah-sekolah.

Dengan paparan diatas dapat dikatakan bahwa dalam penyusunan rencana pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini pemerintah juga melibatkan masyarakat sebagai penyalur aspirasi guna terciptanya suatu perencanaan yang baik. Menurut Bapak Sabar warga desa Ngebel yang berprofesi sebagai pedagang buah mengatakan bahwa:

“.....terkait dengan adanya rencana pengembangan daerah ini, masyarakat sudah diberi tahu dan diajak musyawarah oleh kepala desa, dan masyarakat menerima hal tersebut sebagai kabar baik. sehingga sebagian masyarakat setuju mengenai rencana pengembangan daerah. karena masyarakat sadar bahwa pengembangan tersebut bertujuan untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Ponorogo pada umumnya dan masyarakat Ngebel pada khususnya....”

## 1.2. Tahap Penyusunan Program Rencana

Rencana tapak kawasan wisata Telaga Ngebel sebagai salah satu instrumen pengembangan maupun pengendalian akan menjadi efektif apabila pada tahap

selanjutnya atau pada pelaksanaannya dijadikan pedoman oleh penyelenggara pembangunan, baik oleh pemerintah maupun swasta

Untuk mengetahui secara jelas jenis – jenis kegiatan pembangunan, pengadaan fasilitas, infrastruktur maupun perlengkapannya, pihak pelaksana dan sumber dana untuk kegiatan pembangunan tersebut, maka perlu adanya indikasi program yang berisi tentang perincian jenis-jenis kegiatan pembangunan yang akan dihasilkan oleh produk rencana tapak kawasan wisata Telaga Ngebel.

Dalam penyusunan program rencana ini, masyarakat tidak terlalu dilibatkan karena pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menyusun program ini, seperti yang disampaikan oleh Camat Ngebel bapak Drs Sartomo Msi:

“...Dalam penyusunan program rencana ini lebih diserahkan kepada pihak-pihak yang terkait, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan (BAPEDA), Dinas pariwisata dan Seni Budaya,serta Dinas Kebersihan dan Lingkungan Hidup (DKLH dan masyarakat hanya diberi penjelasan secara garis besarnya saja...”

Bapak Ali warga desa Ngebel juga mengatakan hal yang sama dengan apa yang di katakan oleh camat Ngebel, beliau mengatakan bahwa:

“.....penyusunan program pengembangan daerah tersebut mungkin dibuat oleh pemerintah. Karena dalam musyawarah masyarakat hanya diberitahu jika akan ada pengembangan wilayah dan program-program pengembangan telah ditetapkan oleh pemerintah daerah. masyarakat hanya dimintai saran-saran terkait dengan pengembangan daerah tersebut.....”

Tujuan dari pelaksanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini adalah:

1. Mendata kondisi eksisting tapak dengan potensi dan permasalahan yang ada.
2. Menyusun pola zoning pengembangan kawasan.
3. Merumuskan Rencana Pengembangan Tapak Kawasan dan sirkulasi yang sesuai pada Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

Sedangkan sasaran dari pelaksanaan Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Ngebel ini adalah:

1. Terdatanya segala potensi dan permasalahan dalam segala aspek dalam rencana pengembangan kawasan Wisata Telaga Ngebel.
2. Teridentifikasinya jenis-jenis dan atraksi yang dapat dikembangkan dalam kawasan wisata tersebut.

3. Terbentuknya suatu zoning penggunaan lahan yang sesuai dengan kebutuhan dan juga aturan tata ruang kawasan.
4. Tersusunnya suatu perencanaan kawasan wisata yang dapat menarik pengunjung dalam kontribusi mendukung PAD dan juga ekonomi masyarakat sekitar.
5. Terbentuknya sebuah kawasan wisata alam yang dapat memenuhi kebutuhan rekreatif pengunjung dengan menawarkan tingkat kenyamanan yang tinggi.

Terumuskan suatu perencanaan global kawasan yang tetap berlandaskan pada kelestarian dan berkonsep konservasi terhadap Sumber Daya Alam sehingga pengembangan yang dilakukan dapat meningkatkan mutu lingkungan.

Struktur tata ruang pada Kawasan Wisata Telaga Ngebel direncanakan terpusat dengan dukungan dari sub pusat-sub pusat yang ada di sekitarnya. Pusat kegiatan direncanakan berada pada sebelah utara kawasan Telaga Ngebel.

Pemilihan zona ini adalah karena:

1. Pada kondisi eksisting, zona ini merupakan pusat kegiatan pariwisata dan pemerintahan (pusat IKK Kecamatan Ngebel)
2. Tersedia sarana dan prasarana yang mendukung dua kegiatan di atas, seperti Kantor Kecamatan Ngebel, Koramil, Kantor PWRI, Puskesmas, dan plaza atau ruang terbuka yang dapat digunakan sebagai tempat pertunjukkan hiburan, serta dermaga bis air.
3. Sebagai zona yang memiliki kelengkapan fasilitas tentu banyak menarik pergerakan manusia. Kondisi saat ini juga menunjukkan bahwa pergerakan manusia banyak terkonsentrasi pada zona ini.
4. Tipikal kota-kota di Indonesia adalah bahwa pusat pertumbuhan penduduk cenderung berada pada pusat-pusat pemerintahan.

Sedangkan yang menjadi zona sub pusat kegiatan adalah zona-zona lain seperti; pintu masuk yang menjadi *startpoint* dari pergerakan manusia; pasar sebagai salah satu pendukung pariwisata dan sekolah sebagai zona sosial kehidupan penduduk. Keberadaan zona-zona ini diharapkan mampu menjadi pendukung kegiatan pada zona pusat sekaligus sebagai pemecah pusat aktifitas penduduk agar tidak terkonsentrasi pada satu titik saja.

Kawasan wisata Telaga Ngebel dibagi menjadi 6 (enam) zona. Hal ini dilakukan untuk mempermudah proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan wisata Telaga Ngebel. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Drs Sutarto sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Kecamatan Ngebel, beliau mengatakan bahwa:

“.....Kawasan wisata Telaga Ngebel dibagi menjadi enam zona. Ini dibuat untuk mempermudah proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan wisata Telaga Ngebel. Baik dalam tahap penyusunan rencananya maupun dalam pelaksanaannya sehingga proyek ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat pada waktunya.....”

Pembagian zona tersebut adalah:

a. Zona 1 (*Entrance*)

Kondisi topografi pada zona ini bervariasi mulai dari datar sampai dengan curam. Area dengan kondisi topografi yang relatif datar sesuai untuk pengembangan secara fisik, sedangkan area dengan kondisi topografi yang curam kurang sesuai dengan zona *entrance*. Pola tata guna lahan eksisting adalah berupa kebun, hutan, dan permukiman. Sedangkan sarana eksisting yang ada antara lain adalah loket masuk, sub terminal, area parkir.

Zona ini berada disisi barat dari kawasan wisata Telaga Ngebel. Pada keadaan eksisting zona ini berfungsi sebagai zona penerimaan atau pintu masuk menuju kawasan. Untuk kedepannya, zona ini tetap direncanakan untuk pengembangan zona pintu masuk atau penerimaan dengan menambah sarana pariwisata berupa pintu gerbang masuk, kantor informasi pariwisata, MCK, dan kios souvenir. Sedangkan untuk permukiman yang sudah ada tetap dipertahankan sebagaimana adanya hanya saja yang diperlukan adalah pengendalian bangunan terkait dengan KDB (Koefisien Dasar Bangunan) dan KLB (Koefisien Lantai Bangunan).

b. Zona 2 (Telaga)

Zona ini direncanakan sebagai zona pengembangan wisata air dan budidaya perikanan darat. Untuk kegiatan wisata yang direncanakan adalah seperti perahu motor, memancing, mendayung, maupun bersepeda air. Sarana eksisting yang ada adalah tempat pembibitan ikan dan dermaga perahu. Sehingga perlu disediakan fasilitas maupun sarana yang menunjang fungsi rencana zona ini.

Fasilitas atau sarana terkait adalah perahu motor, dermaga, perahu dayung, dan sepeda air. Untuk pengelolaannya dapat diserahkan kepada investor atau kepada kelompok masyarakat yang ada.

Keramba untuk budidaya perikanan darat diletakkan di sisi bagian barat telaga. Hal ini disamping untuk menjaga kualitas ekologis lingkungan juga dapat mendukung fungsi kawasan sebagai penunjang kegiatan edukasi karena di situ juga terdapat *mini zoo* sebagai sumber pengetahuan tentang kehidupan hewan.

c. Zona 3 (Pelayanan dan Jasa)

Zona ini layak untuk dikembangkan secara fisik karena berada pada topografi yang datar. Tata guna lahan eksisting pada zona ini adalah permukiman, perdagangan, peribadatan, perkantoran, dan kesehatan. Saranan eksisting yang dapat menunjang kegiatan pariwisata pada zona ini adalah MCK, gazebo, shelter, lapangan dan panggung hiburan atau plaza, toko, serta warung makanan dan minuman. Zona ini akan direncanakan sebagai zona pelayanan dan jasa dengan menambah sarana pariwisata berupa kantor pengelola, tempat parkir, taman, playground, tempat persewaan alat olahraga, dan alat pancing dan juga penginapan.

d. Zona 4 (Agrowisata)

Zona ini direncanakan untuk pengembangan kegiatan agrowisata dengan menikmati buah-buahan yang banyak tumbuh di kebun maupundi pekarangan rumah penduduk. Rencana pengelolaan kegiatan agrowisata untuk skala kecil dapat diserahkan kepada penduduk setempat yang memiliki kebun buah-buahan. Namun jika ingin dikembangkan sebagai kawasan sendiri yang dapat memberikan nilai lebih bagi pemasukan kas daerah pengelolaan kawasan dapat melibatkan peran serta dari investor yang tentunya tetap berada dalam pengawasan pemerintah setempat.

Untuk menunjang fungsi zona tersebut harus disediakan pula sarana atau fasilitas. Untuk zona agrowisata sarana atau fasilitas yang diperlukan adalah gazebo, playground, MCK, kios buak, souvenir serta warung makanan dan minuman.

e. Zona 5 (Perdagangan)

Keberadaan Pasar Songgolangit dapat memperkuat fungsi zona yang direncanakan yaitu sebagai zona perdagangan dan jasa. Untuk itu langkah pertama yang perlu dilakukan terkait dengan hal itu adalah revitalisasi bangunan pasar. Diharapkan melalui revitalisasi bangunan, nantinya perhatian wisatawan dapat terpecah tidak hanya menuju pada pusat kegiatan saja namun kegiatan wisatawan dapat juga terkonsentrasi pada ini. Hal ini adalah penting adanya sebagai usaha untuk menumbuhkan sub pusat kegiatan wisata.

Untuk menunjang fungsinya tentunya tidak terlepas dari ketersediaan sarana maupun fasilitas perdagangan, seperti toko/ kios souvenir, warung makanan, gazebo, sebagai tempat beristirahat sejenak, dan yang tidak kalah penting adalah tempat parkir untuk kendaraan pribadi wisatawan.

f. Zona 6 (Hutan Penyangga)

Zona ini merupakan zona privat yang tidak layak untuk dikembangkan secara fisik karena memiliki topografi yang curam dan berfungsi sebagai resapan air bagi daerah-daerah yang ada di sekitarnya. Pengembangan fisik pada zona ini hendaknya dilakukan seminimal mungkin untuk mencegah kerusakan lingkungan di kawasan wisata Telaga Ngebel. Zona ini direncanakan untuk kawasan penyangga namun kawasan hutan penyangga bagian barat yang bertopografi sedang direncanakan sebagai tempat penangkaran satwa. Pada zona ini perlu dilengkapi dengan sarana pariwisata berupa mini zoo, gazebo, MCK, serta prasarana jalan setapak untuk track lintas alam maupun hiking.



Tabel 6

## Rencana Pembentukan Kawasan dan Program-Programnya

No	Sektor	Tujuan Pembentukan Kawasan	Program – Program yang Ditempuh
1.	Permukiman	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Permukiman yang sehat dan ideal</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penertiban sempadan bangunan.</li> <li>• Penataan ruang sesuai dengan penggunaan lahan.</li> <li>• Penentuan luas lantai dan ketinggian maksimum bangunan.</li> <li>• Penertiban IMB.</li> <li>• Intensifikasi bangunan.</li> </ul>
2.	Industri Kecil	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan Pendapatan masyarakat.</li> <li>• Mendorong investasi.</li> <li>• Mendorong Pengembangan wilayah.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menumbuhkembangkan industri kecil yang ada sehingga mampu bersaing dengan komoditas unggulan lainnya.</li> <li>• Pemasaran hasil kerajinan.</li> <li>• Penyediaan sarana dan prasarana pendukung untuk berkembangnya industri kecil.</li> <li>• Daya tarik untuk membeli di tempat lokasi.</li> <li>• Perluasan kesempatan kerja dan ketrampilan.</li> </ul>
3.	Perdagangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan pendapatan masyarakat.</li> <li>• Penambahan Pendapatan Asli</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan tempat perbelanjaan berupa kios-kios untuk memasarkan barang hasil kerajinan setempat.</li> <li>• Perbaikan sarana dan</li> </ul>

		Daerah (PAD)	<p>prasarana perdagangan yang ada, seperti pasar Songgolangit.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan baik kualitas dan kuantitas dari hasil alam yang ada, seperti ikan dan buah-buahan.</li> </ul>
4.	Pariwisata	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemanfaatan SDA.</li> <li>• Mendorong pengembangan wilayah.</li> <li>• Meningkatkan pendapatan masyarakat.</li> <li>• Mendorong investasi.</li> <li>• Penambahan Pendapatan Asli Daerah (PAD)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penambahan akomodasi wisata.</li> <li>• Pengembangan wisata air, seperti bis air, sepeda air, memancing.</li> <li>• Wisata budidaya ikan air tawar.</li> <li>• Pengembangan wisata tradisional melalui agenda wisata budaya yang secara rutin digelar di kawasan wisata Telaga Ngebel.</li> <li>• Pengembangan wisata petualangan, seperti outbound, hiking, camping, dan tracking.</li> <li>• Pembangunan gazebo sebagai tempat istirahat sejenak untuk menikmati sejenak untuk menikmati view kawasan Telaga Ngebel.</li> </ul>
5.	Transportasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kelancaran lalu lintas.</li> <li>• Perbaikan aksesibilitas jalan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas permukaan jalan.</li> <li>• Penambahan lebar jalan.</li> <li>• Memperlancar arus pergerakan</li> </ul>

			<p>manusia dan barang.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembuatan trotoar pada lokasi tertentu.</li> <li>• Pengoptimalan keberadaan Sub Terminal Sahang.</li> <li>• Pengoperasian kereta wisata sebagai akomodasi alternatif bagi pengunjung yang tidak membawa kendaraan pribadi.</li> <li>• Penambahan lokasi parkir off street.</li> </ul>
6.	Utilitas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penunjang penggunaan tanah.</li> <li>• Penunjang aktifitas dan penerangan.</li> <li>• Pemenuhan kebutuhan air bersih.</li> <li>• Meningkatkan sanitasi dan mencegah pencemaran lingkungan.</li> <li>• Meningkatkan jaringan komunikasi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan dan penambahan saluran drainase.</li> <li>• Pembuatan saluran pembuangan rumah tangga.</li> <li>• Penambahan lampu penerangan jalan.</li> <li>• Pengelolaan sumber air bersih.</li> <li>• Pengembangan jaringan komikasi.</li> <li>• Pengadaan TPS dan tempat sampah di sekitar kawasan Telaga Ngebel.</li> </ul>
7.	Konservasi sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menjaga kelestarian lingkungan.</li> <li>• Mempertahankan kawasan konservasi (hutan lindung).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penghijauan pada lokasi tertentu.</li> <li>• Menggalakkan program pemeliharaan lingkungan.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keseimbangan lingkungan yang berkelanjutan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menghindari pembangunan pada kawasan konservasi (hutan lindung).</li> </ul>
--	---	--

*Sumber: Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel 2007*

### 1.3. Pelaksanaan Rencana

Untuk menciptakan kondisi wilayah perencanaan yang tertib, nyaman sebagai sebuah kawasan wisata yang memiliki nilai jual lebih, maka Pemerintah Kabupaten Ponorogo harus berusaha memberi pelayanan kepada masyarakat luas dengan menyediakan fasilitas dan sarana prasarana yang dibutuhkan untuk berkembangnya sebuah kawasan wisata. Upaya untuk memenuhi pelayanan tersebut salah satunya diwujudkan dengan menyusun suatu bentuk pengendalian yang disusun untuk jangka panjang selama sepuluh tahun dan kemudian dijabarkan dalam program lima tahunan. Demikian pula untuk mengupayakan agar tercipta sebuah perencanaan kawasan wisata yang terpadu, efisien, dan berkesinambungan serta tetap memperhatikan kelestarian lingkungan maka didalam rencana tersebut perlu adanya penjabaran ke dalam tahap-tahap sebagai berikut yaitu 1) Tahap persiapan tahun 2007-2008, 2) Tahap pertama tahun 2009-20012, 3) Tahap kedua tahun 2013-2017.



Tabel 8

## Tahapan dalam Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel

No.	Tahapan	Kegiatan
1.	Tahap Persiapan: Tahun 2007-2008	<p>a. Persiapan pemantapan dan perijinan dalam penyusunan rencana, dengan jalan meninjau ke lokasi yang dijadikan wilayah perencanaan.</p> <p>b. Mempersiapkan dana dan alat-alat yang dibutuhkan dalam melakukan pembangunan sekaligus merumuskan arahan pertama yang akan dikerjakan.</p> <p>c. Mensosialisasikan dan memberikan penjelasan kepada masyarakat selaku salah satu dari obyek perencanaan mengenai rencana pembangunan pada wilayah mereka dan menjelaskan agar masyarakat ikut serta dalam pelaksanaan pembangunan.</p>
2.	Tahap Pertama: Tahun 2009-2012	<p>a. Usaha rehabilitasi dan peningkatan kondisi lingkungan permukiman baik lingkungan perumahan, saluran dan sistem jaringan jalan yang ada.</p> <p>b. Pembebasan lahan dan perbaikan jaringan jalan baik peningkatan mutu jalan maupun perkerasannya.</p> <p>c. Penyediaan lahan untuk sarana dan prasarana pariwisata.</p> <p>d. Pengembangan jaringan utilitas.</p>
3.	Tahap Kedua: Tahun 2013-2017	<p>a. Evaluasi dari pembangunan yang telah direalisasikan atau dilakukan</p>

	<p>pada tahap pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melanjutkan pembangunan yang belum selesai direalisasikan pada tahap pertama.</li> <li>b. Rehabilitasi dan peningkatan mutu sarana dan prasarana pariwisata.</li> <li>c. Penambahan sarana dan prasarana pariwisata yang dibutuhkan.</li> </ol>
--	---

*Sumber: Penyusunan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel 2007*

Dari data tabel diatas dapat dikatakan bahwa setiap tahap perencanaan yang telah ditetapkan harus mengandung unsur ketegasan selain unsur tingkat kepentingan dalam pembangunan. Hal ini sangat penting karena tertib pembangunan akan sangat menunjang terciptanya hasil pembangunan yang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Pengembangan wilayah perencanaan kawasan wisata telaga Ngebel didasarkan pada sektor dan sub sektor yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. Ditinjau terhadap urgensi dan tingkat permasalahannya, prioritas pembangunan pada rencana tapak kawasan wisata Telaga Ngebel adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mendesak

Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang sangat berpengaruh terhadap sektor maupun sub sektor lainnya. Bila tidak segera ditangani akan menimbulkan gangguan atau tidak berkembangnya sektor-sektor lain. Pada wilayah perencanaan hal yang sangat penting dan mendesak adalah pembangunan dan peningkatan kualitas jalan sehingga dapat memudahkan pelayanan dan pemerataan pembangunan karena merupakan aspek yang sangat penting dalam pelayan transportasi barang, manusia, dan jasa terlebih lagi hal ini berkaitan langsung dengan kunjungan wisatawan yang memang sangat diperlukan aksesibilitas yang baik untuk menuju kawasan wisata Telaga Ngebel.

2. Pembangunan yang Diprioritaskan

Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang diharapkan dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan

sektor utama di wilayah perencanaan yang dapat berdampak positif. Hal ini meliputi perdagangan, dan perhubungan, serta fasilitas rekreasi.

### 3. Pembangunan Strategis

Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor penting yang memberikan implikasi struktural dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas, penertiban penggunaan tanah dan bangunan.

### 4. Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang tidak bersifat kebutuhan dasar, tetapi dipandang perlu untuk dibangun sesuai dengan kemampuan dan potensi wilayah perencanaan. Hal ini meliputi fasilitas olahraga dan pusat kegiatan masyarakat.

Program pembangunan tersebut diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh potensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan pada wilayah perencanaan termasuk aspek sektoral dan masyarakat. Penentuan program berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan:

1. Tingkat prioritas pembangunan berdasarkan kepentingan termasuk permasalahan yang perlu diatasi dengan cepat.
2. Klasifikasi persoalan inti dan ikutan merupakan persoalan yang mempunyai nilai strategi dan memberikan dampak terhadap pemecahan untuk masalah lain.
3. Program rencana pembangunan yang sudah direncanakan dalam kebijaksanaan pembangunan mempunyai tingkat lebih tinggi.
4. Aspirasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya dalam menentukan prioritas pembangunan.

Skenario pentahapan Pelaksanaan Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel:

#### 1. Strukturisasi Zona *Entrance*

- a. Penataan jalur masuk menuju kawasan dengan menempatkan *main gate* sebagai pintu kedatangan wisatawan.
- b. Penyediaan mobil wisata sebagai salah satu alternatif yang bisa digunakan oleh wisatawan dalam rangka menikmati keindahan obyek wisata Telaga Ngebel.

- c. Pembangunan *shelter* sebagai tempat untuk berganti moda khususnya wisatawan yang datang dengan kendaraan angkutan umum.
- d. Pengoptimalan fungsi Sub Terminal Sahang sebagai tempat tujuan akhir bagi kendaraan angkutan umum dan juga sebagai terminal pariwisata.
- e. Penataan dan penyediaan parkir.

## 2. Strukturisasi Zona Telaga

- a. Budidaya perikanan air tawar melalui keramba-keramba yang dikelola oleh petani-petani ikan.
- b. Penambahan wisata petualangan air, seperti bis air, sepeda air, berperahu.
- c. Penyaluran hobi wisatawan melalui penyediaan dermaga pemancingan.

## 3. Strukturisasi Zona Pelayanan dan Jasa

- a. Sebagai zona inti pelayanan pariwisata.
- b. Penataan dan penyediaan parkir.
- c. Penyediaan fasilitas umum untuk melengkapi sarana dan prasarana yang sudah ada.
- d. Pemanfaatan playground sebagai salah satu daya tarik wisata yang ada di kawasan wisata Telaga Ngebel.
- e. Pemanfaatan lapangan olahraga yang ada, khususnya untuk olahraga tenis.
- f. Pembangunan kantor pengelola pariwisata.
- g. Penyediaan hotel/tempat penginapan untuk menampung wisatawan yang ingin bermalam.

## 4. Strukturisasi Zona Agrowisata

- a. Pemanfaatan kebun buah-buahan milik penduduk setempat.
- b. Peningkatan kualitas hasil kerajinan masyarakat agar layak jual.
- c. Penyediaan fasilitas pendukung.

## 5. Strukturisasi Zona Perdagangan

- a Penataan Pasar Songgolangit sebagai pusat oleh-oleh dari kawasan wisata Telaga Ngebel.
- b Penyediaan fasilitas pendukung.

## 6. Strukturisasi Zona Hutan Penyangga

- a Wisata petualangan alam.

Setiap tahap perencanaan harus melalui sosialisasi guna menghasilkan suatu produk rencana yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan membantu dalam pelaksanaan proyek ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Senu salah satu warga sekitar telaga Ngebel:

“.....didalam pelaksanaan rencana ini,masyarakat sekitar telaga Ngebel siap membantu baik tenaga maupun hal lainnya seperti siap merelakan tanah mereka, bagi yang tanahnya digunakan untuk pengembangan ini.Perlu diketahui bahwa masyarakat disini tidak meminta ganti rugi atas tanah mereka yang terkena proyek pengembangan ini dan mereka menyatakan siap membantu tanpa meminta imbalan.....”

Yang dimaksud tidak meminta ganti rugi adalah bahwa masyarakat merelakan halaman atau sebagian pekarangan rumahnya untuk di jadikan tempat pengembangan jika diperlukan. Hal senada juga diucapkan oleh Ibu Siti, salah satu pedagang sayur sekitar kawasan telaga Ngebel. Beliau mengatakan bahwa:

“.....Kami sebagai pedagang kecil cuma berharap yang terbaik saja bagi kondisi ekonomi kami,kami dukung apa saja,yang penting bisa menambah penghasilan para pedagang di sini.....”

Jadi dapat dikatakan bahwa peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperoleh efektivitas dalam implementasi perencanaan ini baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya.

### 1.4. Pengawasan atas pelaksanaan rencana

Secara *Linkage system*, kawasan wisata Telaga Ngebel dapat dikaitkan secara makro dengan wisata Kawasan Gunung Wilis, dan juga wisata-wisata lain di Kabupaten Ponorogo dan secara mikro dengan pola sirkulasi di dalam obyek wisata Ngebel itu sendiri. Hal ini perlu dikelola secara baik sehingga diharapkan adanya kegiatan-kegiatan wisata yang bisa menahan masyarakat untuk beraktifitas lebih lama di kawasan ini dan di Kabupaten Ponorogo pada umumnya.

Pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel ini juga bisa digunakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain, yaitu membuka kesempatan kerja/lapangan usaha baru bagi warga sekitar obyek wisata dan warga Kabupaten Ponorogo pada umum, untuk memasarkan hasil industri rumah tangga dan kerajinan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo.

Karena rencana proyek pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini merupakan salah satu perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga memerlukan pengawasan dalam pelaksanaan rencananya baik dari pemerintah daerah maupun juga dari masyarakat sekitar kawasan. Agar nantinya bisa dikerjakan dengan baik dan dapat selesai tepat pada waktunya. Seperti yang di ungkapkan oleh Bapak Drs Sutarto sebagai Kepala Seksi Tata Usaha Kecamatan Ngebel yang ditemui diruang kerjanya pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2009, beliau mengatakan bahwa:

“.....Disini jelas bahwa pemerintah sangat mengaharapkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan telaga ini, karena pelaksanaan pengembangan ini melibatkan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pemerintah serta masyarakat harus memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan ini agar bisa menjadi evaluasi nantinya.....”

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Sabar, salah satu warga desa Ngebel yang mengatakan:

“.....karena tujuan utama pengembangan adalah kesejahteraan masyarakat, maka masyarakat beserta pemerintah harus turut serta dalam segala hal yan terkait dengan pengembangan demi keberhasilan pembangunan yang sesuai dengan keinginan dan dibutuhkan masyarakat, baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Dengan adanya peran serta masyarakat dalam proses pengawasan maka masyarakat bisa memonitor langsung pengembangan dan bisa mengetahui sejak dini apabila ada kesalahan atau ketidaksesuaian sehingga bisa segera diperbaiki dan disesuaikan....”

### **1.5. Evaluasi**

Evaluasi dapat membantu kegiatan pengawasan. Dari hasil evaluasi dapat dilakukan perbaikan terhadap perencanaan selanjutnya atau penyesuaian yang diperlukan dalam pelaksanaan perencanaan itu sendiri. Evaluasi harus dilakukan setiap saat agar apabila terjadi kesalahan bisa diketahui sejak dini dan segera diperbaiki.

Seperti yang di ungkapkan oleh camat Ngebel Drs Sartomo Msi yang ditemui diruang kerjanya pada hari jum'at tanggal 19 Juni 2009, beliau mengatakan bahwa:

“.....Masyarakat sangat diinginkan untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan telaga ini, baik dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau kontrol. Karena pelaksanaan pengembangan ini melibatkan lingkungan masyarakat sekitar. Dan pengembangan kawasan telaga ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah serta masyarakat harus memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan ini agar bisa menjadi evaluasi nantinya dan jika ada yang tidak sesuai, bisa segera diperbaiki.....”

Jadi dapat dikatakan bahwa pemerintah beserta masyarakat harus berperan aktif dalam mengevaluasi semua tahap dalam proses perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel sehingga proses perencanaan serta pelaksanaannya berjalan dengan lancar.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan responden, ditemukan faktor - faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

### **2.1. Faktor Pendukung**

Masyarakat adalah mitra pemerintah dalam penataan ruang, oleh karena itu sangat diperlukan peran sertanya dalam setiap tahapan penataan ruang dan tingkatan penyelenggaraan demi tercapainya tujuan penataan ruang. Proyek pengembangan kawasan ini didukung penuh oleh masyarakat sekitar kawasan. Meskipun sebelumnya pemerintah sangat kesulitan mensosialisasikan proyek ini dikarenakan masih rendahnya tingkat pendidikan yang menjadikan masyarakat kurang paham tentang program pembangunan. Tapi berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti, bahwa masyarakat sudah memahami maksud dan tujuan pengembangan kawasan wisata Telaga Ngebel, seperti yang di ungkapkan oleh camat Ngebel, Drs Sartomo Msi, beliau mengatakan bahwa:

“.....Masyarakat sekitar telaga Ngebel sangat berantusias dan siap membantu program ini demi tercapainya telaga Ngebel sebagai obyek wisata unggulan Kabupaten Ponorogo. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa masyarakat rela jika sebagian tanahnya dipakai untuk program pengembangan tapak ini. Masyarakat juga ikhlas membantu pelaksanaannya....”

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa masyarakat sangat mendukung pemerintah untuk mengembangkan kawasan wisata telaga Ngebel, dan mereka siap membantu baik pikiran maupun tenaga. Sehingga proses perencanaan pengembangan maupun pelaksanaannya akan menjadi lancar. Hal senada juga disampaikan oleh bapak Drs.Sukamto warga sekitar telaga Ngebel:

“....Jika pemerintah serius mengembangkan telaga Ngebel, kami sebagai warga Ngebel sangat mendukung dan siap membantu baik tenaga maupun pikiran agar telaga Ngebel ini menjadi terkenal dan banyak dikunjungi wisatawan baik lokal maupun mancanegara.....”

Secara keseluruhan peran serta masyarakat pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo tersebut diwujudkan dalam bentuk:

1. Memanfaatkan produk tata ruang sebagai acuan atau pedoman dalam melakukan kegiatan pembangunan fisik.
2. Memberikan bantuan atau pertimbangan berkenaan dengan wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang di kawasan yang dimaksud.
3. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang-ruang yang ada, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pembangunan.
4. Memberikan bantuan berupa pemikiran atau pertimbangan untuk penertiban kegiatan pemanfaatan ruang dan peningkatan kualitas pemanfaatan ruang.
5. Menyebarluaskan hasil rencana yang telah dibuat dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
6. Melakukan persiapan-persiapan untuk mendukung upaya mewujudkan rencana penataan kawasan seperti yang termuat dalam Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel.
7. Memanfaatkan produk rencana ini sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan investasi.

8. Melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk pembangunan fisik yang dilakukan di kawasan wisata Telaga Ngebel.
9. Memenuhi ketentuan pembangunan yang termuat dalam dokumen Rencana Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

Peran serta masyarakat dalam pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam kawasan wisata telaga Ngebel disampaikan secara lisan maupun tertulis dari tingkat kelurahan ke kecamatan sampai ke kepala daerah dan pejabat yang berwenang.

## 2.2. Faktor Penghambat

Berdasarkan informasi yang diperoleh peneliti bahwa faktor penghambat dalam proses perencanaan pengembangan tapak kawasan Telaga Ngebel bukan dari sisi masyarakatnya, karena masyarakat sangat mendukung sekali program pemerintah tersebut, jadi tidak ada masalah dari sisi masyarakat.

Faktor yang menjadi hambatan dalam proses perencanaan pengembangan kawasan wisata ini adalah faktor pendanaan (*financial*). Faktor pendanaan umumnya masih menjadi kendala utama yang cukup berarti dalam setiap program pembangunan, karena faktor yang paling berpengaruh dan paling utama dalam suatu pembangunan adalah dari segi dana. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya total biaya yang diperlukan untuk merealisasikan rencana pembangunan ini, sedangkan jika hanya bermodal dari APBD Kabupaten Ponorogo saja tentunya tidaklah cukup untuk melaksanakannya sehingga disinilah peran pihak swasta / investor untuk dapat merealisasikan program pembangunan tersebut agar dapat terlaksana sesuai dengan rencana. Seperti yang di sampaikan oleh Camat Ngebel bapak Drs Sartomo MSi di ruang kerjanya:

“....Faktor penghambat dalam pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini terutama adalah dari sektor dana, karena dalam pengerjaannya nanti, proyek ini memerlukan dana yang tidak sedikit. Sedangkan kalau dari masyarakat kelihatannya tidak ada hambatan dalam berpartisipasi dalam pengembangan kawasan telaga ini.....”

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa faktor dana (*financial*) menjadi hambatan utama dalam perencanaan pembangunan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.

### C. Analisa dan Interpretasi Data

#### 1. Bentuk Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel.

Indonesia adalah negara berkembang, sebagai negara berkembang pembangunan merupakan kegiatan yang menjadi prioritas utama yang dilaksanakan. Selain pembangunan secara fisik, pembangunan secara mental dan spiritual juga menjadi titik tekan dari pembangunan bangsa Indonesia seperti halnya dengan bangsa lain yang sedang berkembang, sedang melaksanakan pembangunan yang pada dasarnya mempunyai dua tujuan yaitu pembangunan bangsa (*nation building*) dan adanya kemajuan social ekonomi (*social economic progress*) masyarakat. Tujuan itu pula yang hendak dicapai bangsa Indonesia sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Sehingga pada dasarnya pembangunan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan dimasa yang akan datang adalah merupakan pekerjaan besar karena sifatnya multi dimensional. Untuk mencapai tujuan itu memerlukan pemikiran yang matang melalui program – program yang rinci dan bertahap.

Hakekat pembangunan adalah pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya. Oleh sebab itu, dalam pembangunan perlu adanya peran aktif atau partisipasi dari berbagai pihak dalam mencapai tujuan pembangunan. Artinya pembangunan bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja akan tetapi masyarakat juga harus dilibatkan dalam pembangunan agar pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat. Menurut pendapat Adimiharja (2003: 1) bahwa dalam paradigma pembangunan sekarang ini pemberdayaan masyarakat dan partisipasi merupakan strategi pembangunan yang bertumpu pada rakyat (*peopel centered development*). Strategi ini menyadari pentingnya kapasitas masyarakat untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal, melalui kesanggupan atas kontrol internal terhadap sumber daya material dan *non - material* yang penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan.

Pembangunan harus dilakukan secara bertahap, yaitu dari tahap penyusunan rencana, penyusunan program rencana, pelaksanaan rencana, pengawasan atas pelaksanaan rencana dan evaluasi. Dari semua tahap tersebut,

masyarakat harus selalu dilibatkan. Seperti halnya dengan Proses Perencanaan Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, masyarakat desa setempat harus ikut dilibatkan, di mana nantinya pembangunan akan berhasil seperti yang diharapkan masyarakat. Hal ini sesuai dengan pendapat Conyers (1992: 154) yang mengatakan bahwa ada tiga alasan mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan, yaitu:

- 4) Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek - proyek pembangunan akan gagal.
- 5) Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa bantuan masyarakat sulit diharapkan bila mereka tidak diikutsertakan.
- 6) Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri

Dalam kerangka pembangunan yang partisipatif, Sumodiningrat (1999) mengajukan 5 (lima) prinsip yang dapat dipakai sebagai pegangan, yaitu:

6. Kebijakan pembangunan harus berpihak pada rakyat.
7. Pedoman pembangunan harus sesuai dengan kebutuhan dan potensi masyarakat.
8. Mekanisme perencanaan pembangunan merupakan perpaduan antara mekanisme *top down* dan *bottom up*.
9. Tim koordinator dan pengendali harus terkoordinasi antar sektor dan antar wilayah.
10. Instrumen pembangunan harus yang menjunjung tinggi keberpihakan kepada rakyat.

Oleh sebab itu, maka pembangunan harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan melalui tahap-tahap sebagai berikut:

### 1.1. Tahap Penyusunan Rencana

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses mempersiapkan kegiatan-kegiatan pembangunan secara sistimatis dimana pilihan-pilihan tersebut dilakukan secara skala prioritas dan bermanfaat bagi masyarakat baik secara efisien dan efektif berdasarkan ukuran atau ketentuan yang dipilih sebelumnya. sebagaimana yang diungkapkan oleh Hardjanto (2008: 54) bahwa suatu perencanaan yang baik adalah perencanaan yang mampu secara tepat menetapkan pilihan, yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada. Data atau informasi akan menjadi penentu dalam proses ini. Semakin akurat data yang ada, akan semakin baik perencanaan bisa disusun.

Perencanaan pembangunan sebagai suatu proses penyusunan rencana pembangunan tersebut selayaknya menyertakan keterlibatan masyarakat sebagaimana diungkapkan oleh Abe (2001: 30), bahwa makna perumusan bukanlah suatu makna yang akademis sifatnya, melainkan proses, dimana pada rakyat diberikan kesempatan untuk mengajukan pokok harapan, kebutuhan, dan kepentingan dasarnya. Apa yang dimaksud tidak lain dari adanya keterlibatan rakyat dalam proses perencanaan.

Tahap penyusunan rencana pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel, merupakan tahap yang penting. Karena bagaimana pembangunan akan dilaksanakan, dengan cara apa, dan bagaimana pembiayaannya harus direncanakan terlebih dahulu Menurut Abe (2001: 88) menyatakan bahwa salah satu tahapan yang perlu dilakukan dalam rangka menyusun rencana pembangunan yang partisipatif adalah tahap perumusan rencana tindakan. Perumusan rencana tindakan adalah proses menyusun apa saja yang akan dilakukan. Proses ini merupakan proses membuat rumusan yang lebih utuh suatu perencanaan dalam sebuah 'rencana tindakan'. Didalamnya memuat beberapa hal seperti apa yang hendak dicapai, dan kegiatan yang hendak dilakukan terlebih dahulu untuk memulai suatu kegiatan penyusunan rencana. Selain itu, untuk menyusun langkah yang baik, maka diperlukan kejelasan rumusan sehingga tidak menimbulkan salah tafsir atau terjadinya penafsiran yang berbeda-beda. Dalam tahap perumusan rencana pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel, tindakan diawali dengan tahap penentuan lokasi. Tahap ini merupakan tahapan yang paling penting

karena dari sinilah nantinya akan ditemukannya lokasi yang sesuai dan layak untuk dijadikan / digunakan sebagai pusat pengembangan tapak wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo yang dapat mendorong terjadinya kinerja usaha yang efektif efisien dan perencanaan manajemen pengelolaan dapat dijalankan dengan baik sesuai rencana.

Selain itu sosialisasi pemerintah Kabupaten Ponorogo kepada masyarakat sekitar telaga Ngebel harus tetap berjalan karena selain untuk memperbanyak pengetahuan masyarakat tentang proyek pengembangan ini, juga diharapkan juga ikut serta berpartisipasi dalam pelaksanaannya dan bisa menikmati hasil dari pembangunan tersebut. Menurut Ndraha (1990: 103) salah satu dari jenis-jenis partisipasi adalah partisipasi dalam perencanaan yang menjelaskan bahwa dalam kegiatan perencanaan sangat diperlukan data dan informasi yang disampaikan oleh anggota masyarakat. Dengan demikian penyusunan rencana, selain dapat berjalan lancar juga dapat menghasilkan rencana yang mencerminkan masyarakat itu sendiri.

Oleh karena itu, dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo ini sangat diperlukan partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan, rencana, dan program - program pembangunan, karena menurut Siagian (2003: 2), dalam prespektif perencanaan pembangunan, masyarakat memiliki dua posisi utama, yakni: (a) sebagai pemanfaat hasil pembangunan (*beneficiaries*); dan (b) sebagai pelaku pembangunan (*actors, participant*). Menurut Janianton Damanik dan Helmut F. Weber dalam Yoeti (2000: 106), terdapat beberapa langkah dasar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan pembangunan pariwisata serta bersedia untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut, diantaranya adalah Mendorong partisipasi masyarakat lokal dalam proyek dengan mengajak pemimpin lokal, asosiasi lokal, gagasan - gagasan dan harapan masyarakat setempat menjadi sentral dalam penyusunan rencana proyek.

## 1.2. Tahap Penyusunan Program Rencana

Adisasmita (2006: 34) mengungkapkan bahwa penentuan program pembangunan oleh masyarakat yang bersangkutan merupakan bentuk perencanaan

dari bawah, dari akar rumput bawah atau sering disebut sebagai *bottom-up planning*. Perencanaan merupakan arahan bagi suatu organisasi maupun institusi untuk menetapkan prosedur bagi pencapaian sasaran - sasaran yang ditetapkan oleh organisasi tersebut. Adapun fungsi tahapan - tahapan dalam perencanaan pembangunan dapat dirumuskan yakni, pertama, sebagai pedoman pelaksana; kedua, dapat mengadakan perkiraan pelaksanaan yang akan dilalui; ketiga, dapat memilih alternatif; dan keempat, sebagai alat standar untuk mengadakan pengawasan.

Perencanaan pembangunan memang suatu usaha sebagai refleksi dari peran Pemerintah dalam mendorong gerak pembangunan ke arah tertentu. Tetapi perlu diingat bahwa proses atau usaha pembangunan yang berencana adalah proses usaha masyarakat yang luas. Oleh karena itu perencanaan pembangunan harus pula dilihat dalam konteks dinamika proses pembangunan dari sesuatu masyarakat bangsa. Di dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, kegiatan yang dilakukan selanjutnya setelah menempuh tahap perumusan rencana tindakan adalah melaksanakan tahap penyusunan program.

Dalam penyusunan program rencana pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo, ada hal-hal yang menjadi kewenangan pemerintah daerah secara penuh, ada juga yang bisa melibatkan masyarakat. Tahap Penyusunan program rencana merupakan salah satu tahap yang merupakan kewenangan pemerintah daerah. Sehingga dalam penyusunan program rencana ini, masyarakat tidak terlalu dilibatkan karena pemerintah yang mempunyai wewenang dalam menyusun program ini.

Menurut Tjokroamidjojo (1996: 57) bahwa dalam tahap penyusunan program dilakukan perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, suatu perincian jadwal kegiatan, jumlah dan jadwal pembiayaan serta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga mana yang akan melakukan program-program pembangunan.

Pada tahap penyusunan program dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif diartikan sebagai perumusan suatu tindakan yang akan dilakukan sebagai hasil dari suatu usaha sadar dan terorganisir dalam memilih alternatif terbaik dari serangkaian alternatif yang ada guna membuat keputusan yang terbaik

dalam memanfaatkan sumber daya secara optimum dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Secara sederhana dapat dipahami sebagai suatu proses menyusun langkah-langkah dalam mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai suatu tujuan diantaranya adalah membuat perumusan yang lebih terperinci mengenai tujuan atau sasaran dalam jangka waktu tertentu, menentukan yang menjadi sasaran suatu program, prinsip kerja yang dijalankan, suatu perincian kegiatan yang akan dilakukan beserta penentuan lembaga atau kerjasama antar lembaga yang akan melakukan program-program pembangunan.

Dalam kegiatan yang dilakukan pada tahap penyusunan program perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo diawali dengan menetapkan tujuan utama dari perencanaan program pembangunan tersebut yaitu menentukan pusat dari kegiatan pembangunan struktur tata ruang pada kawasan wisata telaga Ngebel dengan dukungan sub-pusat sub-pusat yang ada disekitarnya. Dalam tahap penyusunan program rencana ini, pemerintah daerah menetapkan berbagi zona untuk dikembangkan. Penetapan zona-zona tersebut sesuai pertimbangan-pertimbangan dari pemerintah daerah agar pengembangan bisa terkelola dengan baik. Zona-zona tersebut di antaranya adalah sebagai berikut Zona 1 (*Entrance*), Zona 2 (Telaga), Zona 3 (Pelayanan dan Jasa), Zona 4 (Agrowisata), Zona 5 (Perdagangan), Zona 6 (Hutan Penyangga). Pembagian zona-zona tersebut bertujuan untuk mempermudah proses perencanaan dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan wisata Telaga Ngebel.

### **1.3. Pelaksanaan Rencana**

Dari data-data diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pengembangan telaga ngebel sudah dimulai sejak beberapa tahun yang lalu, meskipun sampai sekarang pelaksanaannya masih kurang maksimal, itu dikarenakan beberapa faktor terutama faktor dana. Tapi pemerintah daerah bekerjasama dengan pemerintah provinsi serta dukungan dari masyarakat sekitar akan berusaha untuk terus mengembangkan kawasan ini.

Dari sini dapat diketahui adanya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dimana hal ini sesuai dengan pengertian partisipasi menurut

Mubaryanto (1998: 35) adalah sebagai kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri.

Dalam tahap pelaksanaan, harus sudah ada implementasi dari rencana. sehingga sudah ada tindak lanjut mengenai pengembangan. Sehingga pada tahap pelaksanaan ini operasi perlu diikuti implikasi pelaksanaannya, bahkan secara terus-menerus memerlukan penyesuaian-penyesuaian. Dari data-data yang diperoleh pengembangan wilayah perencanaan didasarkan pada sektor dan sub sektor yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. Ditinjau terhadap urgensi dan tingkat permasalahannya. Dari data-data yang diperoleh pengembangan wilayah perencanaan didasarkan pada sektor dan sub sektor yang perlu diprioritaskan pelaksanaannya. Ditinjau terhadap urgensi dan tingkat permasalahannya, prioritas pembangunan pada rencana tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:

1. Pembangunan mendesak  
Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang sangat berpengaruh terhadap sektor maupun sub sektor lainnya.
2. Pembangunan yang Diprioritaskan  
Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang diharapkan dapat menggerakkan mekanisme percepatan pertumbuhan dan perkembangan sektor utama di wilayah perencanaan yang dapat berdampak positif. Hal ini meliputi perdagangan, dan perhubungan, serta fasilitas rekreasi.
3. Pembangunan Strategis  
Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor penting yang memberikan implikasi struktural dalam jangka panjang sesuai dengan tujuan pembangunan masyarakat adil dan makmur. Hal ini meliputi pembangunan fasilitas, penertiban penggunaan tanah dan bangunan.
4. Yaitu pembangunan sektor dan sub sektor yang tidak bersifat kebutuhan dasar, tetapi dipandang perlu untuk dibangun sesuai dengan kemampuan dan potensi wilayah perencanaan. Hal ini meliputi fasilitas olahraga dan pusat kegiatan masyarakat.

Program pembangunan tersebut diharapkan dapat mengkoordinasikan seluruh potensi yang bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan pada wilayah perencanaan termasuk aspek sektoral dan masyarakat. Penentuan program berdasarkan pada pertimbangan – pertimbangan:

1. Tingkat prioritas pembangunan berdasarkan kepentingan termasuk permasalahan yang perlu diatasi dengan cepat.
2. Klasifikasi persoalan inti dan ikutan merupakan persoalan yang mempunyai nilai strategi dan memberikan dampak terhadap pemecahan untuk masalah lain.
3. Program rencana pembangunan yang sudah direncanakan dalam kebijaksanaan pembangunan mempunyai tingkat lebih tinggi.
4. Aspirasi masyarakat dalam memberikan kontribusinya dalam menentukan prioritas pembangunan.

Hal di atas sesuai dengan pendapat Sumodiningrat (1999: 172), bahwa inti dari sasaran pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak.

Maka dari itu salah satu sasaran yang ingin dicapai dalam perencanaan pembangunan dalam pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo adalah meningkatnya partisipasi masyarakat dan kapasitas kelembagaan masyarakat dalam pembangunan di tingkat daerah, meningkatnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan ekonomi masyarakat, dan meningkatnya perekonomian serta kesejahteraan masyarakat.

Dari data-data yang diperoleh juga dapat diketahui bahwa setiap tahap perencanaan harus melalui sosialisasi guna menghasilkan suatu produk rencana yang berdasarkan pada aspirasi masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masyarakat diharapkan membantu dalam pelaksanaan proyek ini. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Senu salah satu warga sekitar telaga Ngebel yang mengatakan bahwa dalam pelaksanaan rencana ini, masyarakat sekitar siap membantu baik tenaga maupun hal lainnya seperti siap merelakan tanah mereka, bagi yang tanahnya digunakan untuk pengembangan. Perlu diketahui bahwa

masyarakat tidak meminta ganti rugi atas tanah mereka yang terkena proyek pengembangan ini dan mereka menyatakan siap membantu tanpa digaji. Mubaryanto (1998: 35) mengemukakan bahwa kesediaan masyarakat untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan diri. Dari pengertian tersebut terkandung makna bahwa partisipasi harus muncul sebagai kesadaran, kerelaan setiap anggota masyarakat untuk ikut serta mensukseskan pembangunan tanpa adanya paksaan.

Jadi peran masyarakat sangat dibutuhkan untuk memperoleh efektivitas dalam implementasi perencanaan ini baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ndraha (1990: 103), yang menyatakan bahwa salah satu jenis partisipasi masyarakat dalam pembangunan antara lain partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan yang menyatakan bahwa rencana yang dihasilkan melalui proses perencanaan dengan mengakomodasikan aspirasi masyarakat secara utuh akan dapat melibatkan anggota masyarakat tersebut dalam kegiatan. Hal ini mengandung arti psikologis, sebab anggota masyarakat semakin menyadari bahwa keberadaan mereka pada kegiatan perencanaan itu mendapat perhatian dari pimpinan, karenanya dalam kegiatan pelaksanaan suatu program partisipasinya dalam segala bentuk baik kesediaannya bekerja secara fisik ataupun pemberian sumbangan uang, barang ataupun barang - barang material akan semakin bertambah.

#### **1.4. Pengawasan atas pelaksanaan rencana**

Pengembangan obyek wisata Telaga Ngebel ini juga bisa digunakan untuk mendorong pengembangan sektor-sektor yang lain karena kawasan wisata Telaga Ngebel dapat dikaitkan secara makro dengan wisata Kawasan Gunung Wilis, dan juga wisata-wisata lain di Kabupaten Ponorogo dan secara mikro dengan pola sirkulasi di dalam obyek wisata Ngebel itu sendiri. Hal ini perlu dikelola secara baik sehingga diharapkan adanya kegiatan-kegiatan wisata yang bisa menahan masyarakat untuk beraktifitas lebih lama di kawasan ini dan di Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Pengembangan sektor-sektor lain tersebut misalnya adalah membuka kesempatan kerja/ lapangan usaha baru bagi warga sekitar obyek

wisata dan warga Kabupaten Ponorogo pada umumnya, untuk memasarkan hasil industri rumah tangga dan kerajinan yang diharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Ponorogo. Menurut Spillane (1987: 133) menyatakan bahwa pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, baik dari segi ekonomi, sosial dan kultural. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik dan sosial dari suatu negara. Disamping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan kerangka kerja kebijaksanaan pemerintah untuk mendorong dan mengendalikan pengembangan pariwisata.

Karena rencana proyek pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini merupakan salah satu perencanaan pembangunan pemerintah Kabupaten Ponorogo sehingga memerlukan pengawasan dalam pelaksanaan rencananya baik dari pemerintah daerah maupun juga dari masyarakat sekitar kawasan. Drs Sartomo Msi juga mengatakan bahwa pemerintah sangat mengharapkan masyarakat sekitar untuk berpartisipasi dalam pengembangan kawasan telaga Ngebel, karena pelaksanaan pengembangan ini melibatkan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pemerintah serta masyarakat harus memonitor pelaksanaan pengembangan kawasan ini agar bisa menjadi evaluasi nantinya.

Tujuan dari pengawasan adalah:

- a) Mengusahakan supaya pelaksanaan rencana berjalan sesuai dengan rencananya,
- b) Apabila terdapat penyimpangan maka perlu diketahui seberapa jauh penyimpangan tersebut dan apa sebabnya,
- c) Dilakukannya tindakan korektif terhadap adanya penyimpangan-penyimpangan.

Untuk itu diperlukan suatu sistem monitoring dengan mengusahakan pelaporan dan *feedback* yang baik daripada pelaksanaan rencana.

Pengawasan tersebut harus dilakkan oleh pemerintah daerah maupoun oleh masyarakat sehingga hasil dari pengembangan akan sesuai dengan harapan dan partiipasi masyarakat juga harus ada dalam pengawasan.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ndraha (1990: 103), yang menyatakan bahwa salah satu jenis partisipasi mayarakat dalam pembangunan antara lain

partisipasi dalam penilaian yang menyatakan bahwa partisipasi ini diwujudkan dalam bentuk pernyataan atas hasil pelaksanaan rencana yang telah dilaksanakan berdasarkan pada hasil perbandingan antara hasil dan ketentuan - ketentuan yang menjadi dasar pelaksanaan, termasuk pula dalam hal ini adalah perencanaan itu sendiri. Sedangkan menurut Janianton Damanik dan Helmut F.Weber dalam Yoeti (2000: 106), beberapa langkah dasar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan pembangunan pariwisata serta bersedia untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut, diantaranya adalah Pemahaman tentang peran masyarakat. Masyarakat harus melakukan pengawasan atas perkembangan proyek.

### 1.5. Evaluasi

Tahap evaluasi dalam proses perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo ini adalah tahap yang juga sangat penting karena mempengaruhi berhasil tidaknya pelaksanaan pengembangan kawasan wisata ini. Selain dilaksanakan oleh pemerintah, tahap evaluasi juga dari masyarakat, seperti yang diuraikan oleh Cohen dan Uphoff dalam Ndraha (1990: 104) bahwa salah satu bentuk-bentuk partisipasi adalah partisipasi dalam evaluasi (*participation in evaluation*)

Bentuk - bentuk partisipasi yang disebutkan diatas secara garis besar menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat diimplementasikan dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan, partisipasi masyarakat dalam pengendalian pembangunan dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian pembangunan.

Pada intinya keberhasilan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tergantung dengan adanya keterlibatan aktif masyarakat. Di lain pihak perencanaan pembangunan dapat merangsang dan memperluas keterlibatan aktif itu, apabila benar-benar mencerminkan dan ditujukan untuk mencapai tujuan-tujuan sesuai dengan kepentingan masyarakat. Seperti yang tertuang di dalam UUPR No.24 tahun 1992 dinyatakan bahwa penyelenggaraan penataan ruang dilakukan oleh pemerintah dengan peran serta masyarakat merupakan hal yang

sangat penting dalam penataan ruang karena pada akhirnya hasil penataan ruang adalah untuk kepentingan seluruh lapisan masyarakat. Sedangkan menurut Janianton Damanik dan Helmut F. Weber dalam Yoeti (2000: 106), beberapa langkah dasar untuk menggerakkan partisipasi masyarakat agar lebih menaruh perhatian dan kepedulian pada kegiatan pembangunan pariwisata serta bersedia untuk bekerjasama secara aktif dan berlanjut, diantaranya adalah Melakukan pengawasan dan evaluasi secara berlanjut. Jadi dapat dikatakan bahwa dalam tahap evaluasi pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini harus dilakukan evaluasi yang bertahap juga, agar proyek pengembangan ini berjalan dengan lancar dan lebih efektif.

## **2. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Proses Perencanaan Pembangunan Partisipatif pada Pengembangan Tapak Kawasan Wisata Telaga Ngebel, Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo.**

### **2.1. Faktor Pendukung**

Perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo merupakan upaya dari pemerintah untuk memajukan pariwisata di Kabupaten Ponorogo agar dikenal oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Selain itu proyek pengembangan ini bertujuan untuk menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, khususnya yang berada di sekitar lokasi pembangunan. Hal ini dilakukan guna untuk mengurangi tingkat pengangguran yang terjadi, karena dengan dikembangkannya kawasan wisata telaga Ngebel ini maka akan menyerap banyak tenaga kerja terutama untuk berdagang. Menurut Sumodiningrat (1999: 172) bahwa inti dari sasaran pembangunan adalah peningkatan kesejahteraan umum masyarakat. Suatu pembangunan bisa dikatakan berhasil jika mampu mengangkat derajat rakyat sebanyak mungkin pada tatanan kehidupan ekonomi yang lebih baik dan layak. Sebagaimana telah dikemukakan oleh beberapa informan dapat diinterpretasikan bahwa dalam perencanaan pembangunan partisipatif pada pengembangan kawasan wisata telaga Ngebel ini masyarakat sangat mendukung dan sangat antusias untuk ikut serta dalam proses perencanaan maupun pelaksanaannya. Keterlibatan aktif atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan pengembangan kawasan wisata telaga Ngebel dapat berarti keterlibatan dalam proses penentuan

arah, strategi dan kebijaksanaan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Paling sedikit suatu rencana harus peka terhadap kepentingan-kepentingan masyarakat, sehingga dengan demikian mendapat dukungan dalam pelaksanaannya.

Menurut Conyers (1992: 154) ada tiga alasan utama mengapa partisipasi masyarakat diperlukan dalam perencanaan pembangunan :

1. Partisipasi masyarakat merupakan alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek - proyek pembangunan akan gagal.
2. Bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk beluk proyek dan program tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut. Berbagai pengalaman menunjukkan bahwa bantuan masyarakat sulit diharapkan bila mereka tidak diikutsertakan.
3. Adanya anggapan bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat sekitar kawasan telaga Ngebel pada khususnya dan masyarakat Kabupaten Ponorogo pada umumnya sangat mendukung salah satu program pemerintah dalam pembangunan yaitu dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo.

## **2.2. Faktor Penghambat**

Sektor pendanaan adalah faktor yang sangat berpengaruh terhadap lancar tidaknya suatu pembangunan. Oleh karenanya unsur pendanaan dalam perencanaan program pengembangan tapak kawasan wisata telaga Ngebel ini menjadi hambatan yang utama, karena terlaksana tidaknya suatu program perencanaan pembangunan ditentukan oleh jaminan penyediaan anggaran bagi pelaksanaan rencana tersebut. Dengan demikian dalam perencanaan pembangunan sangat dibutuhkan pelibatan dari berbagai unsur yakni pemerintah, swasta, dan masyarakat demi terealisasinya suatu program pembangunan. Sebagaimana yang

dikemukakan oleh Riyadi (2004: 15) bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi dalam perencanaan pembangunan adalah faktor pendanaan. Dengan kondisi keuangan yang tersedia yaitu keterbatasan dana untuk proses perencanaan pengembangan kawasan ini, maka akan menimbulkan hambatan bagi perencanaan itu sendiri. Menurut pendapat penulis, hal tersebut sangat wajar karena biaya untuk melaksanakan perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo ini sangatlah besar dan untuk mencapai hasil yang baik tentunya memerlukan biaya yang besar pula.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap fokus permasalahan dalam penelitian mengenai partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

- a. Proses perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel di Kabupaten Ponorogo sudah berjalan dengan lancar sesuai dengan tahapan yang telah ditetapkan. Dimana dilaksanakan tahapan-tahapan proses perencanaan yang melibatkan masyarakat yang meliputi Penyusunan rencana, Penyusunan program rencana, Pelaksanaan Rencana, Pengawasan atas pelaksanaan rencana, dan Evaluasi. Dari semua tahap proses perencanaan pembangunan tersebut dapat dikatakan bahwa selain dari pemerintah, masyarakat juga sangat berperan dalam setiap tahapan. Karena masyarakat adalah salah satu faktor pendukung dari suatu pembangunan.
- b. Didalam proses partisipasi masyarakat dalam pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini tidak mengalami kendala atau hambatan. Meskipun kondisi sosiokultur dan tingkat pendidikan masyarakat sekitar kawasan masih rendah, tetapi pemerintah berhasil mensosialisasikan proyek perencanaan pengembangan ini dengan baik dan dapat dipahami oleh masyarakat sekitar dan dapat berperan serta dalam proses perencanaan pembangunan. Yang menjadi kendala dalam pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini adalah faktor dana, karena ini adalah proyek besar jadi harus ada dana yang besar pula.

Untuk memperoleh efektivitas dalam implementasi dalam perencanaan pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel ini, maka dibutuhkan partisipasi masyarakat, baik dalam pelaksanaan maupun pengendaliannya

Dengan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan di atas, maka partisipasi masyarakat didalam pelaksanaan pembangunan kawasan wisata Telaga Ngebel diharapkan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat disekitar Telaga

Ngebel Khususnya dan Kabupaten Ponorogo pada umumnya. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian ruang merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan dalam rangka mensukseskan pembangunan kawasan.

## **B. Saran**

Dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam keseluruhan pelaksanaan rencana pengembangan tapak kawasan wisata Telaga Ngebel maka dalam kegiatannya hendaknya senantiasa memperhatikan kondisi sosial masyarakat setempat, meskipun proses sosialisasi sudah berjalan dengan baik dan diterima masyarakat, tetapi hal ini perlu ditingkatkan karena dengan meningkatnya partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pengembangan kawasan Telaga Ngebel ini maka proses perencanaan dan pelaksanaan akan berjalan dengan lancar.

Selain tentang peran serta masyarakat, aksesibilitas juga memegang peranan penting dalam pengembangan suatu wilayah. Hal ini juga berlaku pada kawasan wisata Telaga Ngebel. Langkah pertama yang harus dilakukan terkait dengan pengembangan wilayah adalah memperbaiki aksesibilitas jalan menuju kawasan tersebut. Karena saat ini masih banyak jalan – jalan yang rusak dan masih sempit. Kelancaran transportasi adalah salah satu faktor yang tidak dapat diabaikan sebab kelancaran kedatangan wisatawan menuju kawasan wisata Tergantung pada hal ini.

Pemberdayaan masyarakat setempat untuk mendukung potensi wisata yang sudah ada. Wujud peran serta masyarakat salah satunya dapat berupa penyediaan barang hasil kerajinan lokal yang memiliki nilai jual dan daya saing yang tinggi.

Pemerintah juga harus memperbanyak even-even tahunan yang diselenggarakan secara periodik. Hal ini dimaksudkan untuk menambah daya tarik obyek wisata yang ditawarkan oleh kawasan wisata Telaga Ngebel. Di harapkan melalui penyelenggaraan even-even budaya mampu menambah secara signifikan jumlah kunjungan wisatawan.